

PERAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU

(Studi Kasus: LPMP Propinsi DKI Jakarta)



**GALIH SEPTIADY
4815126954**

Skripsi Ini Disusun untuk Memenuhi Persyaratan dalam Mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2017**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GALIH SEPTIADY

No. Registrasi : 4815126954

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PERAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU (Studi Kasus: LPMP Propinsi DKI Jakarta)”, ini sepenuhnya karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Jakarta, 26 Februari 2017

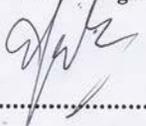
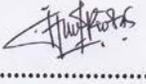
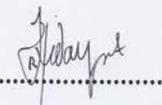

Galih Septiady

LEMBAR PENGESAHAN SKRISPI

Penanggung Jawab/ Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Jakarta



Dr. Muhammad Zid, M.Si
NIP. 19630412 199403 1 002

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1. <u>Abdi Rahmat, M.Si</u> NIP. 19730218 200604 1 001 Ketua Sidang		25 - Februari 2017
2. <u>Dian Rinanta Sari, S.Sos, M.A.P</u> NIP : 19690306 199802 2 001 Sekretaris Sidang		27 - Februari 2017
3. <u>Dr. Evy Clara, M.Si</u> NIP. 19590927 198403 2 001 Penguji Ahli		24 - Februari 2017
4. <u>Rakhmat Hidayat, PhD</u> NIP. 19800413 200501 1 001 Dosen Pembimbing I		25 - Februari 2017
5. <u>Ubedilah Badrun, M.Si</u> NIP. 19720315 200912 1 001 Dosen Pembimbing II		25 - Februari 2017

Tanggal Lulus : 31 Januari 2017

ABSTRAK

Galih Septiady. “Peran Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru: LPMP Propinsi DKI Jakarta”
Skripsi, Jakarta : Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Jakarta. 2017

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dalam meningkatkan kompetensi guru secara pedagogik dan profesional. Peran LPMP dalam meningkatkan kompetensi guru terus dilakukan karena kompetensi guru di Indonesia masih dianggap rendah. Beragam alasan yang dianggap sebagai penyebab hal tersebut, antara lain, rendahnya kualitas pendidikan guru karena jarang mengikuti diklat dan kesejahteraan widyaiswara kurang diperhatikan. Terkait dengan rendahnya kompetensi guru secara tidak langsung mempengaruhi mutu pendidikan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas. Untuk usaha memperoleh data dalam desain kualitatif digunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi kepada beberapa informan seperti ketua seksi fasilitasi penjaminan mutu pendidikan, ketua MGMP sosiologi, koordinator pengawasan LPMP, widyaiswara dan triangulasi data kepada guru sekolah yang telah mengikuti pelatihan oleh LPMP.

Dari hasil penelitian ini bahwa LPMP mempunyai peran untuk melaksanakan tugas penjaminan mutu berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan Nasional serta melakukan pemetaan mutu kompetensi yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Selain itu juga memiliki peran pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu, melakukan supervisi, dan fasilitasi sumberdaya pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dalam penjaminan mutu pendidikan. LPMP berada di setiap provinsi di Indonesia, dengan lingkup kerjanya meliputi seluruh provinsi dimana LPMP tersebut berada. Penelitian ini juga mendeskripsikan bahwa lembaga penjaminan mutu pendidikan terdapat kelompok jabatan fungsional berupa widyaiswara yang bertugas mendidik dan melatih guru.

Kata Kunci: Peran, LPMP, Kompetensi, Guru

ABSTRACT

Galih Septiady. "The Role of Education Quality Assurance Agency (LPMP) In Improving Teacher Competence: LPMP DKI Jakarta"

Thesis, Jakarta: Education Studies of Sociology, Faculty of Social Sciences, State University of Jakarta. 2017

This study aims to describe the role of Quality Assurance Agency for Education in improving the competence of teachers in pedagogical and professional. LPMP role in improving the competence of teachers continue to be made for the competence of teachers in Indonesia is still considered low. Various reasons are considered as the cause of this, among other things, the low quality of teacher education because it rarely follow the training and welfare widyaiswara less attention. Associated with low competence of teachers indirectly affect the quality of education.

This study used a qualitative approach with descriptive methods. Qualitative research is usually very attentive processes, events and authenticity. To attempt to obtain data used in the design of qualitative observation, interviews and documentation to several informants as chairman sexy facilitation of quality assurance, chairman MGMPs sociology, LPMP surveillance coordinator, lecturers and triangulation of data to school teachers who had been trained by LPMP.

From the results of this study that LPMP has a role to carry out the task of quality assurance based on the policy of the Minister of National Education and mapping quality are pedagogic competence and professional competence. It also has a role pengelolaan development and quality of information systems, supervision and facilitation of educational resources to primary and secondary education units, including TK, RA, or other forms that are equal in quality assurance. LPMP located in every province in Indonesia, with the scope of work covers the entire province where LPMP is located. The study also describes that the education quality assurance agencies are functional groups such as trainers yag task of educating and training teachers.

Keywords: Role, LPMP, Competence, Teacher

LEMBAR PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini untuk kedua Orang Tua ku Bapak Dedi Kuswandi dan Ibu ku tercinta Puji Astuti yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan.

Untuk semua sahabat yang memberikan semangat dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih untuk dukungan dan doa kalian yang tulus. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati kalian berlimpah-limpah dan senantiasa melindungi kalian dimanapun berada.

Amin

MOTTO

*Harapan, Cita-Cita dan Kebahagiaan Adalah Kekuatan
Untuk Kembali Bangkit Dan Berdiri Dari Keterpurukan
Kegagalan Biasanya Merupakan Langkah Awal
Menuju Sukses, Tapi Sukses Itu Sendiri Sesungguhnya
Baru Merupakan Jalan Tak Berketentuan
Menuju Puncak Sukses*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan berkat-Nya saja penyusunan skripsi yang berjudul Peran Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru ini dapat diselesaikan untuk mengikuti Seminar Proposal Skripsi.

Selesainya penyusunan laporan ini berkat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi - tingginya kepada yang terhormat:

1. Dr. Muhammad Zid, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta.;
2. Abdi Rahmat, M.Si sebagai Koordinator Program Studi Sosiologi.
3. Rakhmat Hidayat, PhD sebagai Dosen Pembimbing I Skripsi, Terima kasih atas semua saran dan bimbingan akademik yang diberikan. Hal itu membuat penulis selalu belajar dan termotivasi menyelesaikan skripsi sesuai dengan waktu yang direncanakan.
4. Ubedilah Badrun, M.Si sebagai Dosen Pembimbing II Skripsi, Terima kasih atas semua saran dan bimbingan akademik yang diberikan.
5. Yuanita Aprilandini, M.Si selaku Pembimbing Akademik penulis di Program Studi Pendidikan Sosiologi atas atensinya selama ini;
6. Keluarga tercinta. Terima kasih papa dan mama dan Rani untuk selalu memberikan cinta, kasih sayang serta doa yang luar biasa, selalu mendampingi di saat suka dan duka, serta membimbing penulis untuk mengerjakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya.
7. Teman-teman PSNR 2012 untuk kebersamaan dan tawa candanya selama ini yang selalu menghiasi kehidupan penulis selama di kampus.
8. Seluruh informan yang telah bersedia membantu penulis sehingga data yang dibutuhkan dapat membantu penyelesaian penulisan skripsi ini.

9. Segenap karyawan dan staff Perpustakaan Nasional RI, Perpustakaan Universitas Indonesia, UPT Perpustakaan UNJ, Perpustakaan STT Jakarta, dan Perpustakaan STF Driyarkara. Terima kasih atas segala bantuannya dalam meminjamkan buku kepada penulis.

Serta semua orang yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu, semoga Allah SWT memberkati kita semua. Penulis menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan oleh penulis. Akhirnya penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Jakarta, Januari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SKEMA	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.4 Tinjauan Pustaka	14
1.5 Kerangka Konsep.....	18
a. Kompetensi Guru	18
1) Kompetensi Pedagogik	22
2) Kompetensi Profesional.....	24
b. Peran	31
c. LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan)	32
d. Teori Sosial	34
1) Teori Struktur Fungsional	34
1.6 Metodologi Penelitian.....	39
1.7 Subjek Penelitian	39
1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian	40
1.9 Peran Peneliti	41
1.10 Teknik Pengumpulan Data	41
1.11 Triangulasi Data	43
1.12 Sistematika Penulisan	44
BAB II KONTEKS HISTORIS LPMP	
2.1 Pengantar	47
2.2 Profil LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan)	48

2.3	Penutup	62
BAB III PERAN LPMP DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU		
3.1	Pengantar	64
3.2	Program LPMP Dalam Membentuk Guru Yang Berkualitas	68
3.3	Tindakan LPMP Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru	73
3.4	Peran LPMP Dalam Membentuk Guru Yang Lebih Profesional	76
3.5	Proses LPMP Dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik	81
3.6	Proses LPMP Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional	81
3.7	Penutup	82
BAB IV DINAMIKA PENGUATAN GURU DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU		
4.1	Pengantar	84
4.2	Peran dan Dinamika Widyaiswara	86
4.3	Kelemahan LPMP Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru	98
4.4	Respon Guru	99
4.5	Kaitan Teori Struktural Fungsionalisme Dengan Dinamika Penguatan Guru Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru	105
4.6	Penutup.....	107
BAB V PENUTUP		
5.1.	Kesimpulan	109
5.2.	Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA		112
LAMPIRAN.....		117
RIWAYAT HIDUP.....		121

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Sejenis	14
Tabel 1.2 Daftar Informasi Peneliti	40
Tabel 4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tertinggi Di Indonesia.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Ibu Rina Harjanti M.Pd (Ketua Seksi Fasilitas Peningkatan Mutu Pendidikan)	57
Gambar 2.2	Ibu Dra. Kun Maryati, SH (Senior/ Pensiunan Widyaiswara)	58
Gambar 2.3	Ibu Enny Sukilas, M.Si (Ketua MGMP Sosiologi Provinsi DKI Jakarta).....	59
Gambar 2.4	Bapak Harry Praja Muda Karana, SH (Koor Pengawasan LPMP)	60
Gambar 2.5	Ibu Nina Ratna Suminar, M.Si (Widyaiswara Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan DKI Jakarta)	61
Gambar 2.6	Ibu Susi Budiarti, M.Pd (Widyaiswara Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan DKI Jakarta) .	62
Gambar 2.7	Bapak Drs. Sudirman (Widyaiswara Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan DKI Jakarta) .	63
Gambar 2.8	Bapak Dr. Kunandar (Widyaiswara Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan DKI Jakarta) .	64

DAFTAR SKEMA

Skema 1.1 Kerangka Berfikir Penelitian.....	47
Skema 2.1 Struktur Organisasi LPMP DKI Jakarta	55
Skema 3.1 Kerangka Temuan Peran LPMP	85
Skema 4.1 Posisi WI Berdasarkan UU Nomer 5 Tahun 2014 tentang ASN	92
Skema 4.2 Peran Widyaiswara dalam Meningkatkan Kompetensi Guru	93
Skema 4.3 Dinamika Penguatan Guru Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru	94
Skema 4.4 Respon Guru Mengenai Peran Widyaiswara	106

DAFTAR LAMPIRAN

1	Instrumen Penelitian	116
2	Pertanyaan Wawancara Informan	

DAFTAR SINGKATAN

ASN	: Aparatur Sipil Negara
BK	: Bimbingan Konseling
BPG	: Balai Penataran Guru
BPSDM	: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BSND	: Badan Standarisasi Nasional Pendidikan
CPD	: <i>Continuous Professional Development</i>
Diklat	: Pendidikan dan Pelatihan
FPMP	: Fasilitasi Penjaminan Mutu Pendidikan
GTK	: Guru dan Tenaga Kependidikan
IPTEK	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IKIP	: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
JFT	: Jabatan Fungsional Tertentu
KKG	: Kelompok Kerja Guru
LPMP	: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
LPTK	: Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan
MGMP	: Musyawarah Guru Mata Pelajaran
MKKS	: Musyawarah Kerja Kepala Sekolah
MKPS	: Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah
NUPTK	: Nomor Urut Pegawai Tenaga Kependidikan
UKA	: Uji Kompetensi Awal
UKG	: Uji Kompetensi Guru
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
UU	: Undang-Undang
PAD	: Pendapatan Asli Daerah

PEP	:Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
PMPTK	:Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
PNS	:Pegawai Negeri Sipil
PTK	:Penilaian Tindakan Kelas
PP	:Peraturan Pemerintah
P3G	:Program Pengembangan dan Pelatihan Guru
RA	:Raudatul Athfal
SDM	:Sumber Daya Manusia
SKM	:Standar Kompetensi Minimal
SNP	: Standar Nasional Pendidikan
TUPOKSI	:Tugas Pokok dan Fungsi
TK	:Taman Kanak-Kanak
WI	:Widyaiswara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan menjadi tantangan besar dalam memajukan sebuah bangsa. bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, namun seluruh elemen masyarakat memiliki tanggungjawab terhadap kemajuan pendidikan. Pemerinah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan berbagai upaya dalam peningkatan kualitas pendidikan. Berbagai lembaga dan unit pelaksana teknis telah dibentuk dan memiliki tugas serta fungsi meningkatkan kualitas pendidikan baik secara umum maupun khusus dalam bidang garapannya. Salah satu bentuk pendorong peningkatan kualitas pendidikan adalah dengan membentuk Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK).

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan.¹ Pembinaan meliputi pembinaan karir, kenaikan pangkat, promosi jabatan, dan bentuk-bentuk peningkatan karir lainnya, serta peningkatan kompetensinya. Peningkatan kompetensi berarti meningkatkan kualitas. Peningkatan kualitas guru merupakan elemen kunci dalam

¹ Perpres 14 Tahun 2015.

peningkatan pendidikan dasar dan menengah.² Menjelaskan bahwa kualitas guru terdiri dari: *knowing content, knowing how, and being able to teach.*³ Menurut Asia society kualitas guru merupakan kemampuan guru dalam *planning and preparation, classroom environment, instruction, dan professional responsibilities.*⁴

Direktorat Jenderal PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan) berperan dalam penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan nasional. Tujuan penjaminan mutu adalah untuk menjamin bahwa setiap standar nasional pendidikan yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal dan bersinergi. Dalam penjaminan mutu pendidikan diperlukan suatu standar sebagai acuan. Standar tersebut adalah Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional berisi pedoman tentang delapan standar nasional pendidikan, yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Standar ini merupakan standar minimal yang harus dicapai oleh setiap satuan pendidikan (sekolah). Tentu saja standar ini menjadi acuan bagi sekolah dalam mengembangkan mutu pendidikan.

Salah satu lembaga yang diberi tugas untuk membantu peningkatan kualitas pendidikan adalah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP, selanjutnya disingkat). Sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2005, LPMP adalah unit pelaksana

² Harris, D. N., & Sass, T. R. 2007. *Teacher Training, Teacher Quality and Student Achievement. working paper 3, march 2007*, hh. 1-49.

³ ETS. 2004. *Where We stand on teacher quality*. Princeton: ETS. www.ets.org

⁴ Asia society. 2013. *Teacher Quality: The 2013 International Summit on the Teaching Profession*. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, http://asiasociety.org/files/teaching_summit2013.pdf.

teknis Departemen yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan. Salah satu komponen yang ada di LPMP adalah widyaiswara. Widyaiswara mempunyai tugas mendidik, mengajar, dan melatih Pegawai Negeri Sipil (PNS, selanjutnya disingkat); evaluasi dan pengembangan diklat pada lembaga diklat pemerintah. Karakteristik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dalam pelaksanaan tugasnya melibatkan pihak swasta, maka banyak pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang tidak berstatus sebagai PNS, harus dipahami sebagai salah satu subyek peningkatan kualitas oleh LPMP, karena guru dan tenaga kependidikan lainnya yang tidak berstatus PNS memegang peran yang sama dengan guru PNS dalam melaksanakan pendidikan. Artikel ini mendiskusikan tugas dan fungsi widyaiswara LPMP dan perannya dalam peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

Salah satu upaya dalam memberikan contoh sekolah yang memenuhi standar, LPMP perlu mengembangkan sekolah model sebagai sebuah pilot proyek dalam bentuk sekolah pendampingan. Dalam pelaksanaannya secara berkala dan berkelanjutan LPMP akan membantu sekolah pendampingan baik secara akademis maupun manajemen, agar sekolah pendampingan itu dapat berkembang secara optimal, sehingga dapat mencapai standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP). Dengan demikian sekolah

tersebut akan menjadi contoh bagi sekolah lain dalam mengembangkan pola manajemen untuk mencapai standar nasional pendidikan.

Dewasa ini, mutu dan kompetensi guru di Indonesia masih dianggap rendah. Beragam alasan yang dianggap sebagai penyebab hal tersebut, antara lain, terkait dengan rendahnya kompetensi guru ini dan rendahnya kualitas pendidikan guru. Terkait dengan rendahnya kompetensi guru, berdasarkan data Nomor Urut Pegawai Tenaga Kependidikan (NUPTK) pada bulan November 2012, sebesar 2,971, 204 orang guru di Indonesia masih perlu ditingkatkan kompetensinya.⁵ Rendahnya kompetensi ini terbukti dari rendahnya hasil Uji Kompetensi Awal (UKA) yang diadakan sebagai langkah awal peningkatan kompetensi guru; yaitu dari sekitar 281.016 guru yang mengikuti UKA, dengan nilai maksimal 100, hasil nilai rata-rata UKA guru yaitu sebesar 42,25 dengan nilai terendah 1,0 dan nilai tertinggi 97,0.⁶

Data terbaru mengenai hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) pada tahun 2016 yang diikuti 2,9 juta guru di Indonesia menunjukkan hasil yang rendah dan tidak sesuai dengan Standar Kompetensi Minimal (SKM) yang telah ditetapkan Kemendikbud. Rata-rata hasil UKG di seluruh Indonesia adalah 53,02 sementara SKM dari Kemendikbud adalah 55, data ini menunjukkan bahwa kualitas guru kita masih bermasalah dan dihadapkan pada masalah klasik yang pelik. Oleh karena itu kita membutuhkan guru-guru yang memiliki semangat dan kreativitas yang tinggi.

⁵ Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Penjaminan Mutu Pendidikan. 2011. *Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru*. <http://www.ml.scrib.com>.

⁶ Suyanto. 2012. *UKA dan Mutu Guru Kita*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. <http://www.dikdas.kemdikbud.go.id/>, di unduh pada Tgl. 30 Juli 2012.

Sementara itu, terkait dengan kualitas pendidikan guru, dari jumlah guru tersebut masih terdapat sekitar 51 persen yang baru memiliki kualitas pendidikan setingkat S1 atau lebih, dan sisanya masih memiliki kualifikasi pendidikan dibawah S1.⁷ Di samping itu, ada hal lain yang juga secara tidak langsung mempengaruhi mutu pendidikan guru seperti tingkat kesejahteraan guru, pendidikan dan pelatihan guru, dan pembinaan yang diberikan kepada guru.

Berdasarkan *master plan* pembinaan sumber daya manusia (SDM) bidang pendidikan bahwa guru juga dituntut untuk menjadi lebih profesional, bermartabat, dan sejahtera; sehingga guru tidak hanya mampu secara akademik, namun juga sejahtera secara ekonomi, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Oleh karena itu, tuntutan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru sudah seharusnya dilakukan oleh Pemerintah dan instansi lain yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan profesi guru.

Upaya dalam penetapan guru sebagai tenaga professional, maka sebagai seorang guru paling tidak harus memiliki empat (4) kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.⁸ Oleh karena tingkat kompetensi guru yang masih bervariasi, sehingga untuk mencapai tingkat kompetensi guru sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tersebut, pembinaan dan peningkatan profesionalisme guru

⁷ *Ibid.*

⁸ Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

merupakan keniscayaan yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan, baik oleh Pemerintah secara langsung maupun melalui instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan hal tersebut.

Tuntutan terhadap profesionalisme guru semakin tinggi berhubungan dengan perkembangan zaman pada saat ini, karena tidak bisa dipungkiri bahwa guru merupakan aktor yang sangat menentukan dalam proses pembelajaran. Rendahnya mutu guru diklaim sebagai rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, walaupun rendahnya mutu pendidikan bukan berarti disebabkan oleh guru, namun tetap saja bahwa kualitas guru merupakan komponen atau aktor yang memiliki peran strategis dalam mempengaruhi proses pembelajaran dan mutu peserta didik, yang pada akhirnya akan mempengaruhi mutu pendidikan secara umum. Jadi mutu guru akan sangat mempengaruhi prestasi siswa, siswa yang diajar oleh guru yang berkualitas akan menjadikan siswa itu siswa yang berprestasi dan berkualitas pula.

Pengembangan kompetensi guru dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Guru sebagai tenaga fungsional dituntut melakukan pengembangan kompetensinya melalui pengembang keprofesian berkelanjutan. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagai sebuah kebutuhan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dilakukan dalam empat modaliti yaitu secara langsung, melalui dinas, melalui kelompok kerja , dan secara online.⁹

⁹ Hatta, M. 2015. *Pengarahan Pada Penyegaran Metode Evaluasi Program ProDEP Tanggal 10 - 13 April 2015*. Bogor: Transkrip.

Oleh karena itu, tuntutan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan instansi lain yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan profesi guru. Pemerintah dan lembaga-lembaga yang pendidikan harus berperan dalam pembinaan dan peningkatan profesionalisme dan kompetensi guru. Guru professional sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 14 Tahun 2005 pasal 10 wajib memiliki kualifikasi akademik, sertifikat pendidik dan kompetensi yang meliputi rumah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi tersebut menjadi jati diri guru professional sehingga harus dipelihara dan dikembangkan secara terus menerus agar guru tersebut senantiasa mampu menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 35 ayat 1 bahwa “Standar nasional terdiri atas isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala”.

Penelitian menggunakan kasus LPMP Propinsi DKI Jakarta yang masih sangat jarang digunakan oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan apa saja program LMPM dalam menciptakan guru yang berkualitas, bagaimana tindakan LPMP dalam meningkatkan kompetensi guru, dan apa saja peran penting dari LPMP dalam membentuk guru yang lebih profesional. Tentunya hal ini menarik untuk dibahas, LPMP yang dikenal sebagai Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan juga disebut sebagai widyaiswara. Widyaiswara mempunyai tugas mendidik, mengajar, dan melatih Pegawai Negeri Sipil (PNS); evaluasi dan

pengembangan diklat pada lembaga diklat pemerintah. Dalam pengumpulan data di lapangan, peneliti menggunakan metode observasi dengan teknik wawancara secara mendalam kepada para karyawan di LPMP Propinsi DKI Jakarta.

Peran LPMP dalam meningkatkan kompetensi guru dengan mengadakan program Uji Kompetensi Guru (UKG) yang merupakan sebuah kegiatan ujian untuk mengukur kompetensi dasar tentang bidang studi dan pedagogik dalam domain content guru. Kompetensi dasar bidang studi yang diujikan sesuai dengan bidang studi sertifikasi (bagi guru yang sudah bersertifikat pendidik) dan sesuai dengan kualifikasi akademik guru (bagi guru yang bersertifikat pendidik) dan sesuai dengan kualifikasi akademik guru (bagi guru yang belum bersertifikat pendidik). Kompetensi pedagogik yang diujikan adalah integrasi konsep pedagogik ke dalam proses pembelajaran bidang studi tersebut dalam kelas.

Guru harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, professional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional. Sebagai tenaga profesional, guru dituntut untuk selalu mengembangkan diri sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Kondisi dan situasi yang ada menjadi sebab masing-masing guru memiliki perbedaan dan penguasaan kompetensi yang diisyaratkan. Untuk mengetahui kondisi penguasaan kompetensi guru melalui UKG. UKG dimaksudkan untuk mengetahui peta penguasaan guru pada kompetensi

pedagogik dan kompetensi professional. Peta penguasaan kompetensi guru tersebut akan digunakan sebagai dasar pertimbangan dan pemberian program pembinaan dan pengembangan profesi guru. Output UKG difokuskan pada identifikasi kelemahan guru dalam penguasaan kompetensi pedagogik dan professional. UKG wajib diikuti semua guru dalam jabatan baik guru PNS maupun bukan PNS. Pelaksanaan UKG melibatkan LPMP. Agar seluruh instansi yang terlibat dalam pelaksanaan UKG memiliki pemahaman yang sama tentang mekanisme pelaksanaan UKG, maka perlu disusun informais yang lengkap tentang mekanisme pelaksanaan UKG.

Usaha untuk mencapai standard mutu dan profesionalisme guru seperti yang diharapkan, upaya-upaya pembinaan terhadap guru harus dilakukan secara terus menerus. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa pihak yang terlibat dan mempunyai tugas dalam pembinaan dan peningkatan profesionalisme guru di Indonesia. Setelah bidang pendidikan didesentralisasikan ke pemerintah daerah, maka bersamaan dengan itu pengelolaan guru juga menjadi kewenangan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan profesionalisme guru. Meskipun pengelolaan guru sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah (kabupaten/kota). Pemerintah Pusat maupun provinsi juga masih mempunyai fungsi dan tugas untuk ikut serta melakukan pembinaan guru guna meningkatkan profesionalitas guru. Pemerintah pusat melalui Instansi Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) dan Pemerintah Provinsi melalui Instansi LPMP juga berperan dalam pembinaan dan peningkatan profesionalisme guru.

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan. Berkaitan dengan hal itu, Instansi P4TK memfasilitasi guru-guru di Indonesia dalam menambah wawasan dalam menginovasi pembelajaran. Tugas dan fungsi Instansi P4TK adalah mengembangkan dan memberdayakan pendidik dan tenaga kependidikan melalui beberapa diklat fungsional.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyerahkan kepada Instansi P4TK untuk melaksanakan diklat-diklat fungsional, sedangkan Instansi LPMP bertugas mendampingi pelaksanaan 8 (delapan) standar nasional pendidikan.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang menjelaskan peran Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan di atas, maka rumusan masalah yang saya ajukan adalah:

1. Apa saja program LPMP dalam membentuk guru yang berkualitas ?
2. Bagaimana tindakan LPMP dalam meningkatkan kompetensi guru ?
3. Apa saja peran penting dari LPMP dalam membentuk guru yang lebih profesional?
4. Bagaimana proses LPMP dalam meningkatkan Kompetensi Pedagogik dan Profesional?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentu saja mempunyai tujuan dan manfaat seperti penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian tersebut antara lain:

1. Menjelaskan program yang dilakukan oleh LPMP dalam menghasilkan guru yang berkualitas.
2. Menjelaskan tindakan LPMP dalam meningkatkan kompetensi guru.
3. Menjelaskan peran-peran penting dari LPMP dalam membentuk guru yang lebih professional.
4. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai alat pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya untuk dikembangkan di dalam proses pendidikan serta menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam meningkatkan kompetensi guru melalui peran LPMP Propinsi DKI Jakarta.

Selain tujuan, penelitian ini mempunyai manfaat secara teoritis dan praktis antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu sosiologi terutama sosiologi pendidikan. Selain itu manfaat penelitian ini berguna memberikan pengembangan ide dan konsep-konsep dasar tentang pentingnya peningkatan kompetensi terhadap seorang guru.
2. Manfaat Praktis: Bagi penulis, penelitian ini dapat mengasah penulis dalam membuat karya tulis ilmiah serta menambah pengetahuan penulis mengenai masalah yang diteliti. Serta diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap peran penting LPMP dalam meningkatkan kompetensi guru.

1.4. Tinjauan Pustaka Sejenis

Pada tinjauan penelitian sejenis yang pertama adalah Peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP, selanjutnya disingkat) Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Sosiologi.¹⁰ Isi dari penelitian ini adalah pendidikan nasional dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, banyak unsur pendidikan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dalam sistem pengajaran nasional khususnya dalam pembelajaran. Unsur pendidikan tersebut meliputi kurikulum, guru, peserta didik, sarana dan prasarana penunjang, sistem penilaian, bimbingan kepada peserta didik dan pengelolaan program pendidikan.

Usaha meningkatkan kompetensi guru banyak yang harus diperhatikan, terutama pendidikan nasional yang harus sejalan sesuai dengan unsur pendidikan dan sistem pembelajaran. Selain itu skripsi ini juga menjelaskan bahwa MGMP dapat membantu meningkatkan kompetensi mengajar guru. MGMP merupakan wadah pertemuan guru bidang studi dan harus wajib diikuti semua kegiatannya oleh guru. Kegiatan ini bertujuan mengembangkan kemampuan dan keterampilan guru untuk meningkatkan keberhasilan kegiatan belajar mengajar dengan melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain penguasaan kurikulum, menyusun program semester, menyusun program satuan pembelajaran, termasuk penguasaan dan pengembangan metode.

Pada tinjauan penelitian selanjutnya Tesis dari Suparno berjudul Pengembangan Kompetensi Guru Taman Kanak-Kanak Dalam Perspektif Pendidikan Inklusif (Penelitian Pengembangan Melalui Pelatihan Langsung Disertai Pendampingan Guru

¹⁰ Bayu Mahargyanto. 2009. *Peran MGMP Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Sosiologi*. Skripsi. Program Studi Pendidikan Sosiologi. Universitas Negeri Jakarta.

Taman Kanak-Kanak di DIY Tahun 2010).¹¹ Pada karya ilmiah ini dideskripsikan tentang tahap pengembangan kompetensi. Hasil penelitian dari tesis ini adalah kompetensi merujuk pada ketepatan pengetahuan, sikap, keterampilan, kemampuan awal dalam konteks penyesuaian dan pengembangan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas secara efektif dan efisien berdasarkan ukuran standar minimal.

Penelitian ini merupakan sebuah profesi yang mempersyaratkan adanya kompetensi yang harus dimiliki, profesi ini memiliki peranan penting dan signifikan dalam mengajarkan berbagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap guna terbentuknya kepribadian yang baik bagi para siswanya, untuk itu mereka harus memiliki kemampuan-kemampuan yang diperlukan dalam menjalankan profesinya. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi yang berlaku secara nasional. Kompetensi utama sebagai mana merupakan prasyarat yang wajib dimiliki seorang guru dalam melaksanakan profesinya.

Pada penelitian selanjutnya skripsi dari Adrienne Kozan Naumescu yang berjudul *Science Teacher Competencies In a Knowledge Based Society*. Permasalahan dari penelitian ini mengenai Bagaimana program pelatihan guru sains harus menawarkan pelatihan pengetahuan dan kesadaran hubungan antara disiplin

¹¹ Suparno. 2011. *Pengembangan Kompetensi Guru Taman Kanak-Kanak Dalam Perspektif Pendidikan Inklusif* (Penelitian Pengembangan Melalui Pelatihan Langsung Disertai Pendampingan Guru Taman Kanak-Kanak di DIY Tahun 2010). Tesis Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Universitas Negeri Jakarta.

ilmu. Tujuan penelitian ini adalah untuk Memberikan penjelasan seorang guru ilmu pengetahuan harus tahu bagaimana berhubungan ilmu pengetahuan dengan mata pelajaran lain dan untuk membongkar fenomena dalam konteks multidisiplin. Semua peneliti yang terlibat dalam studi kompetensi di bidang profesional yang berbeda telah terfokus pada konsep mobilisasi. Kemampuan untuk membuat operasional dengan sumber daya sendiri untuk memecahkan kategori masalah (masalah dengan karakteristik yang sama). Beberapa sudut pandang mulai dapat digunakan ketika menangani masalah mengidentifikasi utama kompetensi yang dibutuhkan untuk guru. Seperti ketika mendefinisikan hirarki, definisi ini tidak unik dan beberapa jenis klasifikasi dan atau kategorisasi yang berharga.

Tabel 1.1
Perbandingan Penelitian Sejenis

Nama Peneliti	Judul Penelitian, Permasalahan Dan Tujuan Penelitian	Landasan Konsep Dan Teori	Metodologi (Metode, Pendekatan, Teknik Pengumpulan Data)	Hasil Penelitian
Bayu Mahargyanto	Peran MGMP Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Sosiologi Bagaimana peran MGMP dalam membantu meningkatkan kompetensi guru sosiologi? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan secara kontekstual peran MGMP dalam membantu meningkatkan kompetensi guru sosiologi	Mengembangkan kemampuan dan keterampilan guru	Metode deskriptif Pendekatan kualitatif Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara	Pendidikan nasional dapat an sesuai dengan yang di.....n, banyak unsur pendidikan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dalam sistem pengajaran nasional khususnya dalam pembelajaran. Unsur pendidikan tersebut meliputi kurikulum, guru, peserta didik, sarana dan prasarana penunjang, sistem penilaian, bimbingan kepada peserta didik dan pengelolaan program pendidikan
Suparno	Pengembangan Kompetensi Guru Taman Kanak-Kanak Dalam Perspektif Pendidikan Inklusif (Penelitian Pengembangan Melalui Pelatihan Langsung Disertai Pendampingan Guru Taman Kanak-Kanak di DIY Tahun	Konsep kompetensi guru dan pengembangan kompetensi guru	Penelitian pengembangan (R&D) yaitu suatu jenis penelitian yang digunakan untuk mengembangkan dan	Kompetensi merujuk pada ketepatan pengetahuan, sikap, keterampilan, kemampuan awal dalam konteks penyesuaian dan pengembangan yang diperlukan unstuck menyelesaikan suatu tugas secara efektif dan efisien berdasarkan uku ran standar minimal.

Nama Peneliti	Judul Penelitian, Permasalahan Dan Tujuan Penelitian	Landasan Konsep Dan Teori	Metodologi (Metode, Pendekatan, Teknik Pengumpulan Data)	Hasil Penelitian
	<p>2010) Bagaimana tahap pengembangan kompetensi guru Taman Kanak-Kanak dalam perspektif pendidikan inklusif? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tahap-tahap pengembangan kompetensi guru Taman Kanak-Kanak dalam perspektif pendidikan inklusif di DIY Tahun 2010</p>		memvalidasikan model pendidikan	
<p>Adrienne Kozan Naumescu</p>	<p>Science Teacher Competencies In a Knowledge Based Society Bagaimana program pelatihan guru sains harus menawarkan pelatihan pengetahuan dan kesadaran hubungan antara disiplin ilmu. Tujuan penelitian ini adalah untuk Memberikan ilmu pengetahuan dengan mata pelajaran lain dan dalam konteks multidisiplin.</p>	Kompetensi Guru	Menggunakan metode Deskriptif dan pendekatan Kualitatif	Semua peneliti yang terlibat dalam studi kompetensi di bidang profesional yang berbeda telah terfokus pada konsep mobilisasi. Kemampuan untuk membuat operasional dengan sumber daya sendiri untuk memecahkan kategori masalah (masalah dengan karakteristik yang sama).

Nama Peneliti	Judul Penelitian, Permasalahan Dan Tujuan Penelitian	Landasan Konsep Dan Teori	Metodologi (Metode, Pendekatan, Teknik Pengumpulan Data)	Hasil Penelitian
Galih Septiady	<p>Peran Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Bagaimana tindakan LPMP dalam membentuk guru yang berkualitas. Menjelaskan tindakan LPMP dalam meningkatkan kompetensi guru.</p>	<p>Kompetensi Guru Teori Struktural Fungsional Robert K. Merton</p>	<p>Menggunakan metode Deskriptif dan pendekatan Kualitatif Teknik Pengumpulan Data : Wawancara dan Observasi</p>	<p>Penelitian ini mencoba mendeskripsikan peran-peran dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dalam upayanya meningkatkan kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional.</p>

Sumber: Diolah Dari Tinjauan Penelitian Sejenis, 2016

1.5. Kerangka Konsep

a. Kompetensi Guru

Kompetensi merupakan gambaran hakikat kualitatif dari perilaku seseorang. Menurut Lefrancois, kompetensi merupakan kapasitas untuk melakukan sesuatu, yang dihasilkan dari proses belajar. Selama proses belajar stimulus akan bergabung dengan isi memori dan menyebabkan terjadinya perubahan kapasitas untuk melakukan sesuatu. Apabila individu sukses mempelajari cara melakukan satu pekerjaan yang kompleks dari sebelumnya, maka pada diri individu tersebut pasti sudah terjadi perubahan kompetensi. Perubahan kompetensi tidak akan tampak apabila selanjutnya tidak ada kepentingan atau kesempatan untuk melakukannya.¹²

Spencer dan Spencer dalam Hamzah B. Uno, kompetensi merupakan karakteristik yang menonjol bagi seseorang dan menjadi cara-cara berperilaku dan berfikir dalam segala situasi, dan berlangsung dalam periode waktu yang lama. Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kompetensi menunjuk pada kinerja seseorang dalam suatu pekerjaan yang bisa dilihat dari pikiran, sikap, dan perilaku.¹³

Menurut E. Mulyasa, kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Pada sistem pengajaran, kompetensi digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan profesional yaitu kemampuan untuk menunjukkan pengetahuan dan

¹² Lefrancois, G.R. 1995. *The Life Span* (4th ed). California. Hlm. 5.

¹³ Hamzah. B. Uno. 2008. *Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Aksara), Hlm.63.

konseptualisasi pada tingkat yang lebih tinggi. Kompetensi ini dapat diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman lain sesuai tingkat kompetensinya.¹⁴

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan seperangkat penguasaan kemampuan, ketrampilan, nilai, dan sikap yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai guru yang bersumber dari pendidikan, pelatihan, dan pengalamannya sehingga dapat menjalankan tugas mengajarnya secara profesional.

Menurut Zamroni, guru adalah orang yang memegang peran penting dalam merancang strategi pembelajaran yang akan dilakukan. Keberhasilan proses pembelajaran sangat tergantung pada penampilan guru dalam mengajar dan kegiatan mengajar dapat dilakukan dengan baik dan benar oleh seseorang yang telah melewati pendidikan tertentu yang memang dirancang untuk mempersiapkan sebagai seorang guru. Pernyataan tersebut mengantarkan kepada pengertian bahwa mengajar adalah suatu profesi, dan pekerjaan guru adalah pekerjaan profesional. Setiap pekerjaan profesional dipersyaratkan memiliki kemampuan atau kompetensi tertentu agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas-tugas profesionalnya.¹⁵

¹⁴ E. Mulyasa. 2004. *Kurikulum Berbasis Kompetensi* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset), Hlm.37-38.

¹⁵ Zamroni. 2001. *Paradigma Pendidikan Masa Depan* (Jogjakarta: Bigraf Publissing), Hlm. 60.

Guru adalah orang yang berwenang dan bertanggung jawab atas pendidikan muridnya. Ini berarti guru harus memiliki dasar-dasar kompetensi sebagai wewenang dan kemampuan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu kompetensi harus mutlak dimiliki guru sebagai kemampuan, kecakapan dan ketrampilan mengelola pendidikan. Guru harus memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan atau yang dikenal dengan standar kompetensi guru. Standar ini diartikan sebagai suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan. Lebih lanjut Suparlan, menjelaskan bahwa “Standar kompetensi guru adalah ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan perilaku perbuatan bagi seorang guru agar berkelayakan untuk menduduki jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi dan jenjang pendidikan.”¹⁶

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, “Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”. Dalam hubungannya dengan tenaga kependidikan, kompetensi merujuk pada perbuatan yang bersifat rasional dan memenuhi sertifikasi tertentu dalam melaksanakan tugas kependidikan. Tenaga kependidikan dalam hal ini adalah guru. Guru harus memiliki kompetensi yang memadai agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Menurut Piet A. Sahertian, “Kompetensi guru adalah kemampuan melakukan tugas mengajar dan mendidik yang

¹⁶ Suparlan. 2002. *Guru Sebagai Profesi* (Yogyakarta: Hikayat), Hlm. 85.

diperoleh melalui pendidikan dan latihan”.¹⁷ Suparlan berpendapat bahwa “Kompetensi guru melakukan kombinasi kompleks dari pengetahuan, sikap, ketrampilan dan nilai-nilai yang ditunjukkan guru dalam konteks kinerja yang diberikan kepadanya”.¹⁸

Kompetensi guru merupakan gambaran tentang apa yang seyogyanya dapat dilakukan seorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya, baik yang berupa kegiatan dalam berperilaku maupun hasil yang ditunjukkan. Menurut Nana Sudjana, “Kompetensi guru merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki guru”.¹⁹ Berdasarkan uraian di atas kompetensi guru dapat diartikan sebagai kemampuan/kecakapan seorang guru berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai-nilai yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Sesuai PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28 (3) menyatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai agen pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimilikinya.

¹⁷ Piet A. Sahertian. 2000. *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan* (Surabaya: Usaha), Hlm.73

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 85.

¹⁹ Nana Sudjana. 2005. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), Hlm. 17.

2. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.
3. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.
4. Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Sesuai dengan apa yang akan diteeliti, penulis memfokuskan Instansi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dalam meningkatkan kompetensi guru melalui:

1) Kompetensi Pedagogik

Pedagogik berasal dari bahasa Yunani yaitu *paedos* artinya anak laki-laki, dan *agogos* artinya mengantar, membimbing. Jadi pedagogik secara harfiah membantu anak laki-laki zaman Yunani Kuno yang pekerjaannya mengantarkan anak majikannya pergi ke sekolah.

Menurut Prof. Dr. J. Hoogeveld berasal dari Belanda, pedagogic ialah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu, yaitu supaya kelak ia mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Pedagogik merupakan

suatu teori yang secara teliti, kritis dan objektif mengembangkan konsep-konsepnya mengenai hakikat manusia, hakikat anak, hakikat tujuan pendidikan serta hakikat proses pendidikan.

Berdasarkan pengertian seperti tersebut di atas maka yang dimaksud dengan pedagogik adalah ilmu tentang pendidikan anak yang ruang lingkupnya terbatas pada interaksi edukatif antara pendidik dengan siswa. Sedangkan kompetensi pedagogik adalah sejumlah kemampuan guru yang berkaitan dengan ilmu dan seni mengajar siswa.

Proses kompetensi pedagogik yang diberikan LPMP kepada guru dengan cara memberikan pengajaran untuk dapat menguasai ilmu mengajar, mengenal siswa dan lingkungan masyarakat, menguasai teori motivasi, penyusunan kurikulum, penyusunan RPP dan pengetahuan evaluasi pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kompetensi guru.

Rumusan kompetensi pedagogik di dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 ayat 3 bahwa kompetensi ialah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi:

- a) Pemahaman terhadap peserta didik
- b) Perancangan dan pelaksanaan pembelajaran
- c) Evaluasi hasil belajar
- d) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Proses peningkatan kompetensi guru dapat dilihat dari karakteristik kompetensi pedagogik seperti:

- a) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional dan intelektual.
- b) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
- c) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu.
- d) Mengembangkan pembelajaran yang mendidik.
- e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
- f) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
- g) Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik.
- h) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
- i) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
- j) Melalui tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

Kompetensi guru ialah sejumlah kemampuan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tingkatan guru profesional. Proses peningkatan profesionalisme guru melalui kompetensi pedagogik antara lain: guru harus menguasai landasan mengajar, menguasai ilmu mengajar (didaktik metodik), mengenal siswa, menguasai teori motivasi, mengenal lingkungan masyarakat, menguasai penyusunan kurikulum, menguasai teknik penyusunan RPP, menguasai pengetahuan evaluasi pembelajaran, dan lain-lain.

2) Kompetensi Profesional

Kata “profesional” erat kaitannya dengan kata “profesi”. Profesi adalah pekerjaan yang untuk melaksanakannya memerlukan persyaratan tertentu. Kata profesional dapat diartikan sebagai orang yang melaksanakan sebuah profesi dan berpendidikan minimal S I yang mengikuti pendidikan profesi atau lulus ujian profesi.²⁰

Guru mempunyai tanggung jawab sangat besar dalam menjalankan perannya sebagai tenaga pendidik di sekolah. Guna mencapai tujuan pembelajaran yang berkualitas maka peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru harus selalu ditingkatkan. Kompetensi guru perlu ditingkatkan secara terprogram, berkelanjutan melalui berbagai sistem pembinaan profesi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan guru tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan peran strategis guru terutama dalam pembentukan watak siswa melalui pengembangan kepribadian di dalam proses pembelajaran di sekolah.

Tanpa mengabaikan kompetensi yang lainnya, kompetensi profesional merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yang profesional. Kompetensi tersebut harus dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran di sekolah. Kompetensi profesional dipandang penting untuk dikembangkan oleh para guru karena kompetensi profesional mencakup kemampuan guru dalam penguasaan terhadap materi pelajaran dan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran.

²⁰ Wirawan. 2009. *Evaluasi Kinerja Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Salemba Empat), Hlm. 9.

Kompetensi profesional berarti “Guru harus memiliki pengetahuan yang luas serta dalam tentang *subject matter* (bidang studi) yang akan diajarkan, serta penguasaan metodologi dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoritik, mampu memilih metode yang tepat, serta mampu menggunakan dalam proses belajar mengajar”. Oleh karena itu dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kompetensi profesional yaitu kemampuan guru dalam penguasaan terhadap materi pelajaran dan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran yang dimaksud adalah pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan pelaksanaan pembelajaran, penguasaan metode dan media pembelajaran serta penilaian hasil belajar.²¹

Penguasaan guru terhadap materi pelajaran sangat penting guna menunjang keberhasilan pengajaran. A. Samana menekankan pentingnya penguasaan bahan ajar oleh seorang guru untuk mencapai keberhasilan pengajaran. Guru harus membantu siswa dalam akalnya (bidang ilmu pengetahuan) dan membantu agar siswa menguasai kecakapan kerja tertentu (selaras dengan tuntutan teknologi), sehingga mutu penguasaan bahan ajar para guru sangat menentukan keberhasilan pengajaran yang dilakukan.²²

Lebih lanjut dijelaskan Guru hendaknya mampu menjabarkan serta mengorganisasikan bahan ajar secara sistematis (berpola), relevan dengan tujuan, selaras dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (mutakhir),

²¹ Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta), Hlm. 239.

²² A. Samana. 1994. *Profesionalisme Keguruan* (Yogyakarta: Kanisius), Hlm. 61.

dan dengan memperhatikan kondisi serta fasilitas yang ada di sekolah dan atau yang ada di lingkungan sekitar sekolah.²³

Melihat keberadaan pendidik dalam proses pendidikan, substansinya kompetensi pendidik menduduki posisi strategis dalam menentukan kualitas pendidikan, sehingga pemenuhan kompetensi pendidik menjadi suatu yang harus diupayakan, seiring dengan dinamika tuntutan masyarakat yang dinamis, yang memiliki kebutuhan untuk berubah. Sadar terhadap kondisi tersebut dan tuntutan profesionalnya yang terus berkembang, maka pengembangan kompetensi pendidik perlu terus diupayakan dengan melalui berbagai tahapan secara berjenjang. Guru yang professional harus memiliki persyaratan-persyaratan sebagai berikut:²⁴

- 1) Memiliki bakat sebagai guru;
- 2) Memiliki keahlian sebagai guru;
- 3) Memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi;
- 4) Memiliki mental yang sehat;
- 5) Berbadan sehat;
- 6) Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas;
- 7) Guru adalah manusia berjiwa Pancasila; dan
- 8) Guru adalah seorang warga negara yang baik.

Menurut Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas

²³ *Ibid.*

²⁴ Martinis Yamin, 2007. *Desain Pembelajaran Berbasis Tingkat Satuan Pendidikan* (Jakarta: Direktorat Jenderal).

dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.

Menurut PP No. 19 Tahun 2005 penjelasan pasal 28 yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Menurut Hamzah B. Uno, kompetensi profesional guru adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajar. Adapun kompetensi profesional mengajar yang harus dimiliki oleh seorang yaitu meliputi kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem pembelajaran, serta kemampuan dalam mengembangkan sistem pembelajaran..²⁵ Pendapat lain dikemukakan oleh Martinis Yamin, kompetensi profesional yang harus dimiliki guru meliputi:²⁶

1. Penguasaan materi pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan, dan konsep-konsep dasar keilmuan dari bahan yang diajarkannya.
2. Penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan;
3. Penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan, dan pembelajaran siswa.

²⁵ Hamzah, B. Uno. 2011. *Proses Belajar Mengajar* (Jakarta: Bumi Aksara), Hlm. 64.

²⁶ Martinis Yamin. 2007. *Strategi Pembelajaran Berbasis Komputer* (Jakarta: Gaung Persada Press), Hlm. 5.

Menurut pendapat Soediarso dalam Hamzah B. Uno, guru yang memiliki kompetensi profesional perlu menguasai beberapa kemampuan yaitu disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan pelajaran, bahan ajar yang diajarkan, pengetahuan tentang karakteristik siswa, pengetahuan tentang filsafat dan tujuan pendidikan, pengetahuan serta penguasaan metode dan model mengajar, penguasaan terhadap prinsip-prinsip teknologi pembelajaran, dan pengetahuan terhadap penilaian, serta mampu merencanakan, memimpin guna kelancaran proses pendidikan.²⁷

Menurut Uzer Usman, kompetensi profesional secara spesifik dapat dilihat dari indikator- indikator sebagai berikut:²⁸

1. Menguasai landasan pendidikan, yaitu mengenal tujuan pendidikan, mengenal fungsi sekolah dan masyarakat, serta mengenal prinsip-prinsip psikologi pendidikan.
2. Menguasai bahan pengajaran, yaitu menguasai bahan pengajaran kurikulum pendidikan dasar dan menengah, menguasai bahan penghayatan.
3. Menyusun program pengajaran, yaitu menetapkan tujuan pembelajaran, memilih dan mengembangkan bahan pengajaran, memilih dan mengembang-kan strategi belajar mengajar, memilih media pembelajaran yang sesuai, memilih dan memanfaatkan sumber belajar, melaksanakan program pengajaran, menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat, mengatur ruangan belajar, mengelola interaksi belajar mengajar.

²⁷ Hamzah. B. Uno *op.cit.*, Hlm. 64.

²⁸ Mohammad Uzer Usman. 2006. *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: Remaja Rosdakarya), Hlm.19.

4. Menilai hasil dan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.

Menurut Saiful Adi, pengertian kompetensi professional adalah kemampuan atau kompetensi yang berhubungan dengan penyesuaian tugas-tugas keguruan. Kompetensi ini merupakan kompetensi yang sangat penting dan langsung berhubungan dengan kinerja yang ditampilkan.²⁹ Tingkat keprofesionalan seorang guru dapat dilihat dari kompetensi sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk memahami landasan kependidikan
2. Pemahaman dalam bidang psikologi pendidikan,
3. Kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran sesuai dengan bidang studi yang diajarkannya,
4. Kemampuan merancang dan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar,
5. Kemampuan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran,
6. Kemampuan dalam menyusun program pembelajaran, dan
7. Kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan berpikir ilmiah untuk meningkatkan kinerja.

Ruang lingkup kompetensi profesional guru ditunjukkan oleh beberapa indikator. Secara garis besar indikator yang dimaksud adalah:³⁰

1. Kemampuan dalam memahami dan menerapkan landasan kependidikan dan teori belajar siswa;

²⁹ Saiful Adi. 2007. *Kompetensi Yang Harus Dimiliki Seorang Guru*. (<http://Saiful.Adi.Wordpress.com>, diakses 6 Januari 2017)

³⁰ E. Mulyasa. 2007. *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: PT. Rosdakarya), Hlm. 135-136.

2. Kemampuan dalam proses pembelajaran seperti pengembangan bidang studi, menerapkan metode pembelajaran secara variatif, mengembangkan dan menggunakan media, alat dan sumber dalam pembelajaran,
3. Kemampuan dalam mengorganisasikan program pembelajaran, dan
4. Kemampuan dalam evaluasi dan menumbuhkan kepribadian peserta didik.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional guru dapat diartikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki sebagai dasar dalam melaksanakan tugas profesional yang bersumber dari pendidikan dan pengalaman yang diperoleh. Kompetensi profesional tersebut berupa kemampuan dalam memahami landasan kependidikan, kemampuan merencanakan proses pembelajaran, kemampuan melaksanakan proses pembelajaran, dan kemampuan mengevaluasi proses pembelajaran.

Kompetensi profesional guru adalah sejumlah kompetensi yang berhubungan dengan profesi yang menuntut berbagai keahlian di bidang pendidikan atau keguruan. Kompetensi profesional merupakan kemampuan dasar guru dalam pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia, bidang studi yang dibinanya, sikap yang tepat tentang lingkungan PBM dan mempunyai keterampilan dalam teknik mengajar.

Proses kompetensi profesional yang diberikan LPMP kepada guru dengan cara memberikan pembelajaran sains, penguasaan materi, struktur, konsep dan pola keilmuan yang mendukung pelajaran yang diampuh serta mengembangkan keprofesian melalui tindakan mengulang pembelajaran apa yang sudah dijelaskan untuk diulang kembali sehingga dapat meningkatkan kompetensi guru.

b. Peran

Istilah “peran” (*role*) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor-aktor profesional.³¹

Menurut Dewi Wulan Sari “Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”.³²

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan atau lembaga yang menempati atau mengaku suatu posisi dalam sistem sosial.

c. LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan)

LPMP adalah penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan nasional. Lembaga ini merupakan UPT pusat di lingkungan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas.

Sebagai lembaga penjaminan mutu, LPMP telah memiliki sejumlah tenaga struktural dan tenaga fungsional, fasilitas, dan berbagai program. LPMP juga memiliki visi, misi, dan tujuan, serta tugas pokok dan fungsi yang diformulasi sesuai

³¹ Duverger, Maurice. 2010. *Sosiologi Politik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Hlm. 103.

³² Wulansari Dewi, 2009. *Sosiologi (Konsep dan Teori)* (Bandung: PT. Refika), Hlm.106.

dengan kebutuhan pemekaran organisasi dan manajemen pada era otonom. Semua ini diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan pengembangan berbagai kebijakan, program dan kegiatan lembaga yang mampu menjawab kebutuhan lapangan kerja yang terus berkembang, dan diharapkan kedepan LPMP mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara profesional. LPMP dibentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 4 Juli 2003 nomor 087/O/2003 dan surat nomor 044/O/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP, surat keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.127.1/M/PAN/2003 tanggal 30 April 2003 tentang Persetujuan Pendirian Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, Kepmen Diknas No.087/O/2003 Tanggal 4 Juli 2003 tentang Organisasi dan Tata kerja LPMP, Permen Diknas No.49/0/2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja dilingkungan LPMP.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP pasal 2 tugas LPMP yaitu : LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 pasal 3 fungsi LPMP yaitu:

1. Pemetaan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah.

2. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah.
3. Supervisi satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional.
4. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan.
5. Pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan.
6. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

Upaya dalam meningkatkan kompetensi guru merupakan hal yang utama. Kompetensi guru memiliki beberapa aspek kompetensi yaitu kompetensi pendidikan, kompetensi kepribadian, kompetensi professional dan kompetensi kemasyarakatan. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah Peran LPMP Propinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kompetensi guru sesuai dengan yang diharapkan.

d. Teori Sosial

1. Teori Struktural Fungsional

Teori Fungsionalisme struktural menekankan pada keteraturan (order) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas elemen-elemen atau bagian-bagian yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Dalam

perspektif Fungsionalis, suatu masyarakat dilihat sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi yang bekerja dalam suatu cara yang agak teratur menurut seperangkat peraturan dan nilai yang dianut oleh sebagian masyarakat.

Teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat. Dengan demikian seperti halnya peperangan, ketidaksamaan sosial, perbedaan ras bahkan kemiskinan “diperlukan” dalam suatu masyarakat. Perubahan dapat terjadi secara perlahan dan walaupun terjadi suatu konflik maka penganut teori ini memusatkan perhatian kepada masalah bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut agar masyarakat kembali menuju suatu keseimbangan.

Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang stabil dengan suatu kecenderungan kearah keseimbangan, yaitu suatu kecenderungan untuk mempertahankan sistem kerja yang selaras dan seimbang.³³ Perubahan sosial mengganggu keseimbangan masyarakat yang stabil, namun tidak lama kemudian terjadi keseimbangan baru.

Nilai atau kejadian pada suatu waktu atau tempat dapat menjadi fungsional atau disfungsional pada saat dan tempat yang berbeda. Bila suatu perubahan sosial tertentu mempromosikan suatu keseimbangan yang serasi, hal tersebut dianggap fungsional bila perubahan sosial tersebut menganggu keseimbangan, hal tersebut merupakan gangguan fungsional, bila perubahan sosial tidak membawa pengaruh, maka hal tersebut tidak fungsional.

³³ Paul B. Horton, Chester L. Hunt, 2001. *Sosiologi*, (Jakarta : Erlangga), hlm 18.

Gagasan mengenai fungsi berguna agar kita terus mengamati apa yang disumbangkan oleh suatu bagian dari struktur terhadap sistem yang dianalisis atau lebih tepatnya, apa fungsi yang dijalankan dalam sistem itu. Masyarakat adalah organisme yang tidak berdiri sendiri, melainkan bergabung dengan kelompoknya dalam sistem pembagian tugas, yang dalam kenyataannya berkaitan dengan jenis-jenis norma atau peraturan sosial yang mengikat individu pada keadaan sosialnya.

Robert K. Merton adalah salah satu tokoh dalam teori fungsionalisme struktural. Merton telah menghabiskan karir sosiologinya dalam mempersiapkan dasar struktur fungsional untuk karya-karya sosiologis yang lebih awal dan dalam mengajukan model atau paradigma bagi analisa struktural. Merton menolak postulat-postulat fungsionalisme struktural yang masih mentah yang menyebarkan paham :

1. Kesatuan masyarakat yang fungsional

Postulat ini berpendirian bahwa semua keyakinan dan praktik kultural dan sosial yang sudah baku adalah fungsional untuk masyarakat sebagai satu kesatuan maupun untuk individu atau masyarakat. Pandangan ini secara tersirat menyatakan bahwa berbagai sistem sosial pasti menunjukkan integrasi tingkat tinggi.

Kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatasi sebagai suatu keadaan dimana seluruh bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam suatu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur. Tapi menurut Merton, hal itu bisa benar terjadi dalam masyarakat primitive yang kecil,

generalisasi itu tidak dapat diperluas kepada masyarakat-masyarakat yang lebih besar jumlahnya dan lebih kompleks.

2. Fungsional universal

Postulat ini menyatakan bahwa seluruh bentuk kultur dan sosial serta struktur yang sudah baku mempunyai fungsi positif. Menurut Merton, postulat ini bertentangan dengan apa yang ditemukannya dalam kehidupan nyata. Yang jelas bahwa tak setiap struktur, adat, gagasan, kepercayaan dan sebagainya mempunyai fungsi yang positif untuk masyarakat itu sendiri. Karena bisa saja fungsi yang positif itu merugikan bagi masyarakat lainnya.

3. *Indispensability*

Postulat ini menyatakan bahwa semua aspek masyarakat yang sudah baku tak hanya mempunyai fungsi yang positif, tetapi juga mencerminkan bagian-bagian yang sangat diperlukan untuk berfungsinya masyarakat sebagai satu kesatuan. Postulat ini mengarah kepada pemikiran bahwa semua struktur dan fungsi secara fungsional adalah penting untuk masyarakat. Tak ada struktur dan fungsi lain manapun yang dapat bekerja sama baiknya dengan struktur dan fungsi yang kini ada dalam masyarakat. Tapi menurut Merton, setidaknya kita harus bersedia mengetahui bahwa ada beberapa alternative struktural dan fungsional yang terdapat di masyarakat.

Menurut Robert K. Merton, tiga postulat itu bersandar pada pernyataan nonempiris, berdasarkan sistem teoritis abstrak. Maka, Merton pun mengembangkan analisis fungsional sebagai pedoman untuk mengintegrasikan teori dan riset empiris.

Analisis fungsional struktural memusatkan perhatian pada kelompok, organisasi, masyarakat dan kultur. Sasaran studi Merton antara lain adalah : peran sosial, pola institutional, proses sosial, pola kultur, emosi yang terpola secara kultural, norma sosial, organisasi kelompok, struktur sosial, alat-alat pengendalian sosial dan sebagainya.

Teori Fungsionalisme Struktural yang dikemukakan oleh Robert K. Merton ternyata memiliki perbedaan apabila dibandingkan dengan pemikiran pendahulu dangurunya, yaitu Talcott Parsons. Apabila Talcott Parsons dalam teorinya lebih menekankan pada orientasi subjektif individu dalam perilaku maka Robert K. Merton menitikberatkan pada konsekuensi-konsekuensi objektif dari individu dalam perilaku.

Merton menekankan tindakan-tindakan yang berulang kali atau yang baku yang berhubungan dengan bertahannya suatu sistem sosial dimana tindakan itu berakar. Dalam hal ini perhatian Merton lebih kepada apakah konsekuensi objektif tersebut memperbesar kemampuan sistem sosial untuk bertahan atau tidak, terlepas dari motif dan tujuan subjektivitas individu.

Fungsionalisme struktural berfokus pada fungsi-fungsi sosial daripada motif-motif individual. Fungsi-fungsi didefinisikan sebagai konsekuensi-konsekuensi yang diamati yang dibuat untuk adaptasi atau penyesuaian suatu sistem tertentu.

1.6. Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, catatan-catatan yang berhubungan dengan makna, nilai serta pengertian.³⁴ Pendekatan yang dipilih oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif yang merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dilakukan individu atau sekelompok orang.

Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan data.³⁵

1.7. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini pun lebih difokuskan kepada para pimpinan LPMP sebagai pembuat keputusan di dalam tubuh organisasi LPMP. Hal ini dikarenakan judul yang diangkat oleh penulis mengenai Peran LPMP dalam meningkatkan kompetensi guru. Selain para pimpinan LPMP, subjek penelitian ini juga terfokus pada para anggota LPMP karena penulis hendak melihat apa saja program LPMP dalam menciptakan guru yang berkualitas, bagaimana tindakan LPMP dalam meningkatkan kompetensi guru, dan apa saja peran penting dari LPMP dalam membentuk guru yang lebih profesional. Subjek penelitian ini antara lain:

³⁴ Kaelan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat* (Yogyakarta : PT Paradigma), Hlm.5.

³⁵ Miles dan Huberman 1994, dalam John W. Creswell, 2013. *Research Desain: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Yogyakarta; Pustaka Belajar), Hlm 5.

Tabel 1.2
Daftar Informasi Peneliti

No.	Nama Informan	Posisi	Status Informan
1.	Rina Harjanti Sujitno, M.Pd	Kepala Seksi FPMP	Informan Kunci
2.	Harry Praja Muda Karana, SH	Koor. Pengawasan	Informan Pendukung
3.	Dra. Enny Sukilas, M.Si	Ketua MGMP	Informan Pendukung
4.	Dra. Kun Maryati, SH	Senior/Pensiunan Widyaiswara	Informan Pendukung
5.	Nina Ratna Suminar, M.Si	Widyaiswara	Informan Pendukung
6.	Susi Budiarti, M.Pd	Widyaiswara	Informan Pendukung
7.	Drs. Sudirman	Widyaiswara	Informan Pendukung
8.	Dr. Kunandar	Widyaiswara	Informan Pendukung
9.	Ernawati, M.Pd	Guru	Informan Pendukung
10.	Kasmawati, S.Pd	Guru	Informan Pendukung
11.	Anugerahati Handayani, S.Pd	Guru	Informan Pendukung
12.	Tri Hanorah, S.Pd	Guru	Informan Pendukung
13.	Sri Haryati, M.Pd	Guru	Informan Pendukung

1.8. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di LPMP Propinsi DKI Jakarta, Jl. Nangka No. 60, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat bertemu langsung kepada para pemimpin atau tokoh masyarakat yang berpengaruh besar di tubuh organisasi LPMP, sehingga data yang peneliti butuhkan didapatkan oleh sumber yang terpercaya. Waktu penelitian dimulai pada bulan April 2016.

1.9. Peran Peneliti

Peran peneliti disini adalah untuk menjelaskan latar belakang, program, tindakan dan peran penting dari LPMP dalam meningkatkan kompetensi guru dan membentuk guru yang berkualitas dan lebih profesional. Masalah yang terjadi pada kasus ini berawal dari rendahnya mutu pendidikan dan kompetensi guru serta banyaknya guru yang kurang berkualitas serta kurang profesional.

Peneliti ingin menjelaskan penyebab apa saja yang melatarbelakangi rendahnya mutu pendidikan dan kompetensi guru serta kurangnya guru yang berkualitas dan profesional dari peran LPMP. Langkah-langkah yang harus ditempuh peneliti antara lain membuat *review* berbagai macam referensi dari buku, jurnal serta skripsi maupun tesis dan disertasi.

Hal tersebut untuk mendukung hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Selain itu langkah yang harus ditempuh oleh peneliti adalah mengurus proses administrasi perizinan untuk melakukan penelitian di LPMP dengan cara mengurus surat-surat di BAAK UNJ.

1.10. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode :

1. Metode Wawancara

Wawancara digunakan sebagai cara untuk memperoleh data dengan jalan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan atau narasumber. Pada metode ini penulis menggunakan teknik wawancara *semistruktur* dimana dalam pelaksanaannya

lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana satu pihak yang diajukan beberapa pertanyaan atau diminta pendapat. Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka penulis juga menggunakan alat bantu seperti tape *recorder*, dokumentasi, atau material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.

2. Metode Observasi

Dalam hal ini, penulis dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada informan atau narasumber, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas seseorang yang sedang meneliti. Peneliti melakukan observasi dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian serta berinteraksi secara intens dengan nara sumber selama pengumpulan data. Hal ini dilakukan agar data yang didapat lebih lengkap dan terperinci.

3. Metode Studi Kepustakaan

Teknik ini digunakan sebelum penelitian ini dilakukan, hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat memanfaatkan berbagai macam penelitian pustaka, seperti buku, jurnal serta skripsi maupun tesis sejenis yang relevan dengan tema penelitian yang tengah diangkat oleh penulis.

1.11. Triangulasi Data

Usaha dalam menguji keabsahan data, penelitian ini memerlukan triangulasi data dalam melihat peran LPMP dalam meningkatkan kompetensi guru tersebut yang melibatkan kepala LPMP dan para anggota/widyaiswara LPMP. Oleh karena itu untuk mendapatkan keabsahan data yang optimal maka diperlukan verifikasi data hasil wawancara informan kunci dengan hasil wawancara informan pendukung.

Setelah melakukan wawancara kepada kepala LPMP, peneliti pun akan melakukan kroscek dengan mewawancarai beberapa anggota atau widyaiswara LPMP, dan pensiunan widyaiswara. Berkenaan dengan widyaiswara LPMP akan dikroscek mengenai sudut pandang mereka mengenai kompetensi guru melalui kompetensi pendidikan, kepribadian, professional dan kemasyarakatan. Lalu berkenaan dengan kompetensi guru akan dikroscek respon beliau terhadap peran dari LPMP yang telah dibuat LPMP dan cara meningkatkan kompetensi guru yang profesional. Lalu yang terakhir berkenaan dengan guru SMA adalah mengkroscek hasil data lapangan dalam perspektif sosiologis.

1.12. Sistematika Penulisan

Pada bab 1 (Pendahuluan), penulis ingin menjabarkan latar belakang, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan metodologi penulisan. Alasan mengapa peneliti memilih judul “Peran LPMP Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru (Studi Kasus LPMP Propinsi DKI Jakarta Selatan) yang dilandasi oleh perbedaan latar belakang.

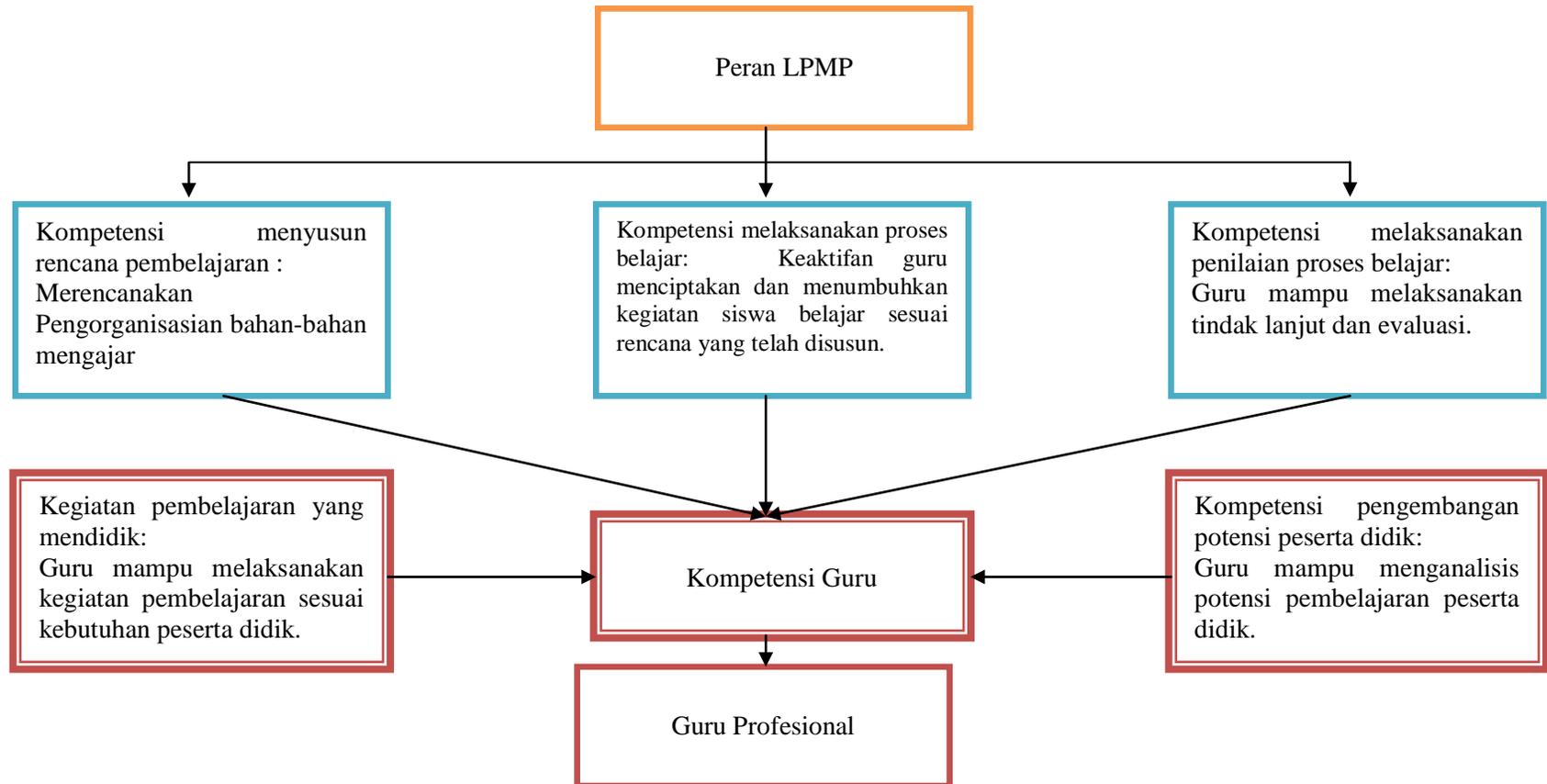
Pada bab 2 peneliti akan menjelaskan LPMP sebagai Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Sejarah terbentuknya LPMP, Visi dan Misi serta tujuan LPMP yang berlokasi di Jl. Nangka No. 60, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selain itu pada bab ini akan dijelaskan tentang struktur organisasi yang ada didalam LPMP.

Pada bab 3 peneliti akan menjelaskan peran LPMP dalam meningkatkan kompetensi guru, dimana pada bab ini akan mengurai alasan terbentuknya LPMP dan hal-hal apa saja yang melatarbelakangi LPMP tersebut untuk meningkatkan kompetensi guru yang lebih professional.

Pada bab 4 peneliti akan memaparkan inti dari penelitian ini yaitu peran LPMP dalam meningkatkan kompetensi guru. Pada bab ini akan mengurai mengenai program, kegiatan dan peran-peran LPMP dalam meningkatkan kompetensi guru tersebut muncul menggunakan konsep-konsep yang sudah dipersiapkan oleh peneliti sebelumnya.

Pada bab 5 penulis akan menguraikan kesimpulan berdasarkan pemabaran penelitian dari bab-bab sebelumnya dan juga peneliti akan memberikan saran yang positif yang dapat membangun bagi pembaca pada umumnya dan peneliti sendiri khususnya.

**Skema 1
Kerangka Berfikir Penelitian**



Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2016

BAB II

KONTEKS HISTORIS LPMP

2.1 Pengantar

LPMP adalah lembaga yang berada di tingkat provinsi di bawah Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. LPMP dikembangkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 087/O/2003, tanggal 4 Juli 2003. Adapun Tugas Pokok dan Fungsinya (TUPOKSI) LPMP adalah sebagai berikut:

Tugas pokok Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yaitu Melaksanakan Penjaminan Mutu Pendidik Dasar dan Menengah di Provinsi berdasarkan Kebijakan Nasional.³⁶

Berdasarkan keputusan MENDIKNAS 044/O/2004, tanggal 14 Mei 2003, Tugas LPMP dapat dirinci sebagai berikut: Menyusun program kerja LPMP, Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penjaminan mutu dikdasmen, Melaksanakan pengembangan sistem informasi mutu dikdasmen di provinsi, Melaksanakan pengelolaan data dan informasi mutu dikdasmen, Melaksanakan pengkajian, pengukuran dan evaluasi mutu dikdasmen, Melaksanakan perancangan model pembelajaran di sekolah, Melaksanakan fasilitasi lembaga pendidikan dan pengelolaan sumber daya pendidikan, Melaksanakan fasilitasi

³⁶ Arsip LPMP Provinsi DKI Jakarta

lembaga pendidikan dalam proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar, Melaksanakan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, Melaksanakan kerjasama dengan lembaga dan masyarakat dalam penjaminan mutu dikdasmen, Melaksanakan penyajian dan penyebarluasan informasi mutu dikdasmen, Melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kerumahtanggaan LPMP, Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen LPMP, Menyusun laporan LPMP.

Fungsi dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) meliputi: Pengukuran dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah, Perancangan model-model pembelajaran di sekolah sesuai dengan kebutuhan provinsi dan standar mutu nasional, Fasilitasi lembaga pendidikan dalam proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar, Fasilitasi lembaga pendidikan dalam pengelolaan sumber daya pendidikan, Fasilitasi pelaksanaan peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan, Pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan lembaga.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan adalah penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan nasional. Lembaga ini merupakan Unit Pelaksanaan Teknis pusat di lingkungan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas.

2.2. Profil LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan)

LPMP DKI Jakarta yang merupakan Unit Pelayanan Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud ini awalnya bernama Balai Penataran Guru (BPG) Jakarta. Secara geografis LPMP DKI Jakarta berlokasi di Jl. Nangka Nomor 60 Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan.

Balai Penataran Guru Jakarta pada awal berdirinya diatur oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0116/O/1977 tanggal 23 April 1977 tentang Tata Kerja Balai Penataran Guru dan Tenaga Teknis Regional. Selanjutnya melalui Keputusan Mendikbud Nomor 0181/O/1979 tanggal 20 Agustus 1979 Balai Penataran Guru dan Tenaga Teknis Regional diubah menjadi Balai Penataran Guru.

Struktur organisasi BPG saat itu diatur menurut Keputusan Mendikbud Nomor 0203/O/1978 tanggal 23 Juli 1978, yang susunan organisasinya belum mencerminkan lembaga penataran karena belum tampak adanya tenaga fungsional. Dalam perkembangan selanjutnya, fungsi dan peranan BPG Jakarta semakin meningkat setelah terbit Keputusan Mendikbud Nomor 024/O/1991 tanggal 2 Mei 1991 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Penataran Guru yang didalamnya memuat pula jabatan struktural dan fungsionalnya dalam BPG.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 087/O/2003 tanggal 4 Juli 2003 Balai Penataran Guru Jakarta mengalami

perubahan menjadi LPMP Provinsi DKI Jakarta. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melakukan restrukturisasi dan refungsionalisasi BPG Jakarta dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan Permendiknas No. 07 Tahun 2007 dan mengalami penyesuaian dan penyempurnaan-penyempurnaan seiring dengan perubahan struktur organisasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP dan selanjutnya Permendikbud Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP. Dan terakhir dengan Permendikbud RI Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

Permendikbud RI Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Permendikbud di atas, LPMP menyelenggarakan fungsi pemetaan mutu, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu, supervisi satuan pendidikan, fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan, melaksanakan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan serta melaksanakan urusan administrasi LPMP. Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi LPMP

sebagaimana tersebut diatas, LPMP DKI Jakarta telah melaksanakan berbagai kegiatan penjaminan mutu.

Visi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yaitu terwujudnya penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi DKI Jakarta sesuai SNP dengan dilandasi semangat gotong royong.

Misi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) meliputi: Mewujudkan penjaminan mutu pendidikan dasar sesuai SNP, Mewujudkan penjaminan mutu pendidikan menengah sesuai SNP dan Memperkuat tata kelola penjaminan mutu pendidikan dan pelibatan publik.

Tujuan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yaitu: Memiliki integritas, Kreatif dan inovatif, Inisiatif, Pembelajar, Menjunjung meritokrasi, Terlibat aktif dan Tanpa pamrih.

Tata nilai Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yaitu kebersamaan, transparansi, integritas, religious dan professional.

Program Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) adalah Peningkatan Lembaga Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA, SMK).

Sedangkan Kegiatan Utama Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yaitu melakukan penjaminan mutu pendidikan melalui kegiatan pemetaan mutu pendidikan, supervise pendidikan berdasarkan SNP, fasilitasi peningkatan mutu

pendidikan, serta kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Indikator kerja kegiatan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) meliputi: Persentase sekolah di semua jenjang yang telah di supervise dalam pencapaian SNP, Persentase sekolah di semua jenjang yang telah difasilitasi dalam pencapaian SNP, Persentase sekolah di semua jenjang yang telah dipetakan mutunya, Persentase sekolah di semua jenjang yang meningkat indeks efektivitasnya dan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Tata kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yaitu LPMP mempunyai tugas: melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) menyelenggarakan fungsinya meliputi: Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah, Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah, Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan, Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan, Pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan, dan Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.³⁷

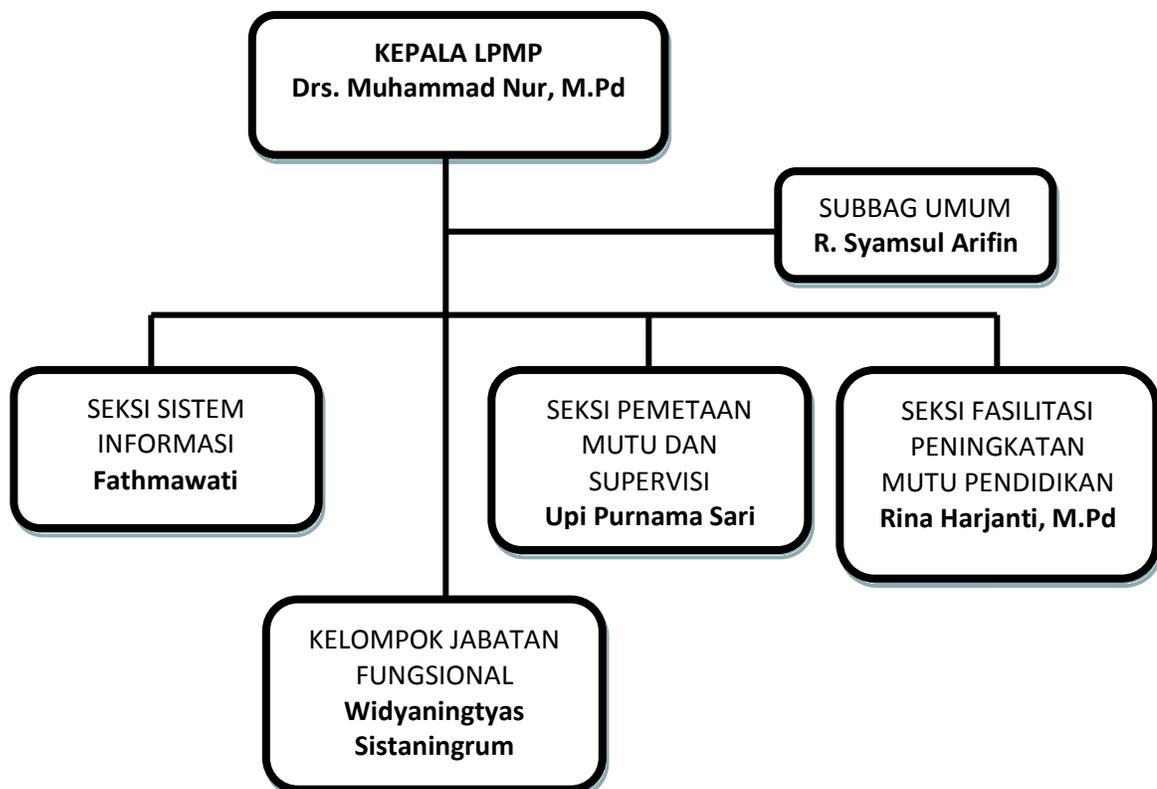
³⁷ Dokumen LPMP Provinsi DKI Jakarta

Struktur Organisasi LPMP

Sejalan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di atas, LPMP DKI Jakarta telah menyusun organisasi tata kerja sebagai berikut: Kepala, Subbagian Umum, Seksi Sistem Informasi, Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi, Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan, dan Kelompok Jabatan Fungsional

Skema 2.1

Struktur Organisasi LPMP DKI Jakarta



Sumber : LPMP Jakarta, 2016

Penelitian ini terdapat 1 (satu) informan kunci yang merupakan Kepala Seksi FPMP dan 7 (tujuh) informan pendukung yang merupakan Pensiunan Widyaiswara, Ketua MGMP, Koor Pengawasan dan Widyaiswara. Subjek penelitian ini pun lebih difokuskan kepada para pimpinan LPMP sebagai pembuat keputusan di dalam tubuh organisasi LPMP.

Hal ini dikarenakan judul yang diangkat oleh penulis mengenai Peran LPMP dalam meningkatkan kompetensi guru. Selain para pimpinan LPMP, subjek penelitian ini juga terfokus pada para anggota LPMP karena penulis hendak melihat apa saja program LPMP dalam menciptakan guru yang berkualitas, bagaimana tindakan LPMP dalam meningkatkan kompetensi guru, dan apa saja peran penting dari LPMP dalam membentuk guru yang lebih profesional.

Rina Harjanti Sujitno M.Pd

Penelitian ini meliputi informan kunci yaitu Ibu Rina Harjanti Sujitno, M.Pd yang mempunyai jabatan Kepala Seksi FPMP yang diangkat sejak bulan Januari 2016 sebelumnya beliau mengisi jabatan sebagai Kepala Seksi Pemetaan Mutu Pendidikan. Beliau memiliki latar belakang ilmu di bidang matematika dan statistika, unit kerja beliau di LPMP DKI Jakarta beralamat di Jl. Nangka No. 60, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Beliau lulusan S1 FMIPA Matematika – Statistika dan di lanjut S2 UNJ Jurusan Penelitian dan Evaluasi Pembelajaran (PEP).

Gambar 2.1
Ibu Rina Harjanti M.Pd
(Ketua Seksi Fasilitas Peningkatan Mutu Pendidikan)



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2016

Dra. Kun Maryati

Selain informan kunci peneliti juga mewawancarai informan pendukung diantaranya Dra. Kun Maryati, SH selaku senior dan pensiunan widyaiswara yang telah memiliki banyak pengalaman dalam hal mendidik, mengajar dan melatih guru untuk menjadi guru yang berkompeten. Beliau lulusan dari S1 UII Fakultas Hukum dan dilanjutkan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidik (IKIP) Jakarta . Selain itu beliau juga merupakan penulis buku mata pelajaran sosiologi SMA yang bukunya merupakan salah satu *best seller*. Ibu Kun mempunyai karier mengajar di beberapa sekolah di antaranya SMA 35 Jakarta, SMA Bakti Idatha, SMA Suluh dan SMA Pembangunan 2 Jakarta.

“Saya orangnya ada kelemahan tidak hafal nama orang saya tipe orang yang ada seneng banget ini-ini lebih baik bagaimana siswa itu maju. Prioritas saya ke

perkembangan karena saya tahu siswa saya. Setelah itu kekecewaan tidak ada rasa konsen produk itu mulai dari buat Modul yang akhirnya saya membuat Modul dengan Pak Imran karena tugas saya Internal dan kebetulan saya pernah sekolah di bidang Seni. Hubungan itu dari fenomena yang ada bukan dari pendapat orang. Karena kita harus sesuai dengan kemampuan. Motivasi saya seneng ketemu orang yang baik dan penuh tantangan di LPMP, karena orang banyak belajar akan banyak pengalaman”,³⁸

Gambar 2.2
Ibu Dra. Kun Maryati, SH
(Senior/ Pensiunan Widyaiswara)



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2016

Dra. Enny Sukilas, M.Si

Selanjutnya Dra. Enny Sukilas, M.Si adalah seorang guru Sekolah Menengah Atas (SMA) yang mengajar mata pelajaran sosiologi di salah satu SMA (Sekolah Menengah Atas) yang berada di wilayah Jakarta Utara, yang mempunyai jabatan Ketua MGMP Provinsi DKI Jakarta. Pendidikan beliau lulusan S1 IKIP Jakarta Jurusan PMP dan S2 STIAM I Jakarta Jurusan Administrasi Pendidikan. Selain sebagai Ketua MGMP, beliau juga mempunyai karier mengajar di antaranya : Guru SMA 71 Jakarta 1987 – 2005, Guru SMA 13 Jakarta 2005 – Sekarang, Wakil Ketua MGMP Sosiologi 2010 – 2014.

³⁸ Wawancara dengan Dra. Kun Maryati, Pada Tanggal 30 april 2016. Pkl 16.00 WIB

Gambar 2.3
Ibu Enny Sukilas, M.Si
(Ketua MGMP Sosiologi Provinsi DKI Jakarta)



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2016

Harry Praja Muda Karana, SH

Selanjutnya Harry Praja Muda Karana, SH selaku Koor Pengawasan. Beliau lulusan S1 Hukum Universitas Pakuan (Unpak) Tahun 1997 Awalnya tidak terpikirkan oleh beliau untuk terjun ke dunia pendidikan karena memang latar belakang pendidikannya adalah Sarjana Hukum, awal mula beliau bisa terjun ke dunia pendidikan karena melihat adanya lowongan pekerjaan disektor pendidikan. Karier beliau di antaranya: Admin Staff di Al Azhar Tahun 1998, Wirausaha Tahun 1999, BPG Tahun 2001, Sub Bagian Umum Tahun 2001-2002, Seksi Fasilitas Peningkatan Mutu Pendidikan Tahun 2003-2012, dan Koor Pengawasan Tahun 2012 – Sekarang.

Gambar 2.4
Bapak Harry Praja Muda Karana, SH
(Koor Pengawasan LPMP)



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2016

Nina Ratna Suminar, M.Si

Selain informan pendukung di atas widyaiswara juga sebagai informan pendukung di antaranya Ibu Nina Ratna Suminar, M.Si selaku widyaiswara yang memiliki pendidikan S1 Unsoed Sosiologi Tahun 1996 dan S2 UI Sosiologi Tahun 2009 awalnya beliau belum turun langsung ke dunia pendidikan karena sempat bekerja di sebuah Bank. Karier beliau diawali sebagai: Staff BPR Syariah (1996-1997), Staff GTT SMIT Sejahtera Depok (1998-2009), dan sempat mengajar di sekolah swasta, setelah itu ketika ada lowongan menjadi PNS beliau langsung terjun ke dunia pendidikan dan menjadi Staff Kajian Mutu Pendidikan (2002-2004), Staff Pemetaan Mutu dan Supervisi Pendidikan dan Widyaiswara (2006 – Sekarang).

Semenjak menjadi Widyaiswara di LPMP telah banyak pengalaman yang ibu nina miliki dan terus bertekad menjadikan guru di jakarta khususnya lebih baik lagi.

Gambar 2.5
Ibu Nina Ratna Suminar, M.Si
(Widyaiswara Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan DKI Jakarta)



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2016

Susi Budiarti, M.Pd

Selanjutnya Ibu Susi Budiarti, M.Pd yang tertarik menjadi widyaiswara karena panggilan hati, dan juga merasa tertantang karena menurut beliau mengajar adalah hal yang sangat menyenangkan dan mulia, mulai dari menjadi guru SD sampai SMA telah beliau jalani. Bu susi berlatar belakang pendidikan S1 Bahasa Indonesia IKIP Bandung dan S2 PEP UNJ. Karier Mengajar beliau sangat banyak di antaranya: Guru SD Al Makmurrah (1987-1989), SMP Utama (1989 – 2003), SMA Utama (1997 – 2003), SMP Malidar (1997 – 2000), Staff LPMP (2002 – 2006) dan Widyaiswara (2006 – Sekarang).

Gambar 2.6
Ibu Susi Budiarti, M.Pd
(Widyaiswara Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan DKI Jakarta)



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2016

Drs. Sudirman

Bapak Drs. Sudirman merupakan seorang widyaiswara yang termasuk senior juga, ketertatikan nya di dunia mengajar sudah keliatan dari usia muda, beliau termasuk widyaiswara yang sudah sangat senior, hampir 13 tahun bapak sudirman menjadi seorang widyaiswara. Menurutnya mengajar adalah sebuah tantangan tersendiri apalagi menjadi seorang widyaiswara. Beliau mempunyai pendidikan S1 Biologi IKIP Jakarta dan S2 PEP UNJ. Karier mengajar beliau selama ini di antaranya: Guru SMA As Syafiyah 2, SMA Muhammadiyah 5, SMA 92 Jakarta, SMA Ondeng Siaw Sulut, SMA 69 Jakarta, SMA 19 Jakarta, SMA Pancoran Barat, SMA Pusaka Abadi (Jakarta Utara), SMA Cinderamata Indah (Jakarta Barat) dan Widyaiswara (2003 – Sekarang).

Gambar 2.7
Bapak Drs. Sudirman
(Widyaiswara Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan DKI Jakarta)



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2016

Dr. Kunandar

Selanjutnya Bapak Dr. Kunandar berusia 44 tahun merupakan widyaiswara yang berinstansi di LPMP DKI Jakarta dan Dosen Uhamka Jakarta. Pendidikan terakhir beliau yaitu S-3 Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Beliau mempunyai banyak pengalaman dalam hal pendidikan dan pelatihan yang tidak dapat dijabarkan satu persatu. Riwayat pekerjaan beliau selama ini yaitu sebagai Guru SMAN 30 Jakarta 1994-1998, Guru SMAN 31 Jakarta 1998-2002, Kepala Sekolah SMA Fajar 2000-2002, Selaku Widyaiswara di LPMP DKI Jakarta 2004-sekarang dan Dosen Uhamka 2009 – sekarang. Selain itu beliau juga sebagai penulis buku dari tahun 2005 – 2013.

Gambar 2.8
Bapak Dr. Kunandar
(Widyaiswara Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan DKI Jakarta)



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2016

Motivasi jadi widyaiswara karena senang dengan dunia mengajar. Untuk pendidikan di Jakarta masih kurang karena. Peran LPMP sudah menjalankan program-program dalam melaksanakan pendidikan. Karena LPMP lembaga yang sudah mengontrol dunia pendidikan. Kekurangannya dalam potensi guru masih kurang.

2.3 Penutup

Pada bab ini dijelaskan LPMP yang dikenal sebagai Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan juga disebut sebagai widyaiswara. Widyaiswara mempunyai tugas mendidik, mengajar, dan melatih PNS evaluasi dan pengembangan diklat pada lembaga diklat pemerintah. Sebagai lembaga penjaminan mutu, LPMP telah memiliki

sejumlah tenaga struktural dan tenaga fungsional, fasilitas, dan berbagai program. LPMP juga memiliki visi, misi, dan tujuan, serta tugas pokok dan fungsi yang diformulasi sesuai dengan kebutuhan pemekaran organisasi dan manajemen pada era otonom. Semua ini diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan pengembangan berbagai kebijakan, program dan kegiatan lembaga yang mampu menjawab kebutuhan lapangan kerja yang terus berkembang, dan diharapkan kedepan LPMP mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara profesional. Dalam upaya meningkatkan kompetensi guru merupakan hal yang utama. Kompetensi guru memiliki beberapa aspek kompetensi yaitu kompetensi pendidikan, kompetensi kepribadian, kompetensi professional dan kompetensi kemasyarakatan. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah Peran LPMP Propinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kompetensi guru sesuai dengan yang diharapkan. Peran LPMP dalam UKG serta menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan proses belajar dan melaksanakan penilaian proses belajar sehingga guru mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kebutuhan dan mampu menganalisis potensi pembelajaran peserta didik maka akan tercipta guru yang profesional.

BAB III

PERAN LPMP DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU

3.1 Pengantar

Bab ini akan mendeskripsikan tentang Peran LPMP dalam meningkatkan kompetensi guru. Penjabaran mengenai kompetensi guru diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru. Kompetensi Guru menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 16 Tahun 2007 dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Dalam penelitian ini akan memfokuskan pada kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional.

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya (SNP, penjelasan Pasal 28 ayat 3 butir a).

Secara etimologis, kata pedagogi berasal dari bahasa Yunani, *peados* dan *agogos* (*paedos* = anak dan *agogo* = mengantar atau membimbing). Maka pedagogi berarti membimbing anak. Tugas membimbing ini melekat dalam tugas seorang

pendidik, yaitu guru maupun orang tua. Oleh karena itu pedagogi berarti segala usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk membimbing seorang anak menjadi manusia dewasa yang matang. Ketika peran pendidik dari orang tua digantikan oleh peran guru di sekolah maka tuntutan kemampuan pedagogis ini beralih kepada guru. Karena itu guru tidak hanya sebagai pengajar yang mentransfer ilmu, pengetahuan dan keterampilan kepada siswa tetapi juga merupakan pendidik dan pembimbing yang membantu siswa untuk mengembangkan segala potensinya terutama terkait dengan potensi akademis maupun non akademis. Melalui peran ini para guru secara spesifik haruslah menjadi orang yang dapat membuat siswa belajar dengan maksimal. Dengan demikian kompetensi pedagogis sangat erat kaitannya dengan kemampuan didaktik dan metodik yang harus dimiliki guru sehingga dapat berperan sebagai pendidik dan pembimbing yang baik.

Berdasarkan Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru, Standar Kompetensi Pedagogis dijabarkan dalam kompetensi inti sebagai berikut:

1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, cultural, emosional dan intelektual.
2. Menguasai teori-teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu
4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik

5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran
6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya
7. Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik
8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran
10. Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran

Berdasarkan uraian di atas, maka kompetensi pedagogic yang dapat diukur meliputi kemampuan mengelola pembelajaran, pemahaman terhadap karakteristik siswa, pengembangan potensi peserta didik, pemanfaatan penilaian hasil belajar dan pemanfaatan media dalam pembelajaran untuk pencapaian kompetensi.

Sedangkan kompetensi professional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam termasuk kemampuan akademik lainnya sebagai pendukung profesionalisme guru yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP, penjelasan Pasal 28 ayat 3 butir c). Secara lebih spesifik menurut Permendiknas No. 16 Tahun 2007, standar kompetensi ini dijabarkan ke dalam lima kompetensi inti, yaitu:

1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu

2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu
3. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif
4. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif
5. Memanfaatkan teknologi informais dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Kemampuan professional guru meliputi: merancang dan merencanakan program pembelajaran, mengembangkan program pembelajaran, mengelola pelaksanaan program pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran dan mendiagnosis factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran.

Berdasarkan uraian di atas, kompetensi profesional yang dapat diukur meliputi penguasaan materi, konsep dan pola pikir keilmuan, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran, dan pengembangan materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan adalah penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan nasional. Sebagai lembaga penjaminan mutu, LPMP telah memiliki sejumlah tenaga struktural dan tenaga fungsional, fasilitas, dan berbagai program. LPMP juga memiliki visi, misi, dan tujuan, serta tugas pokok dan fungsi yang diformulasi sesuai dengan kebutuhan pemekaran organisasi dan manajemen pada era otonom. Semua ini diharapkan dapat

berfungsi sebagai acuan pengembangan berbagai kebijakan, program dan kegiatan lembaga yang mampu menjawab kebutuhan lapangan kerja yang terus berkembang, dan diharapkan kedepan LPMP mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara profesional.

3.2 Program LPMP Dalam Membentuk Guru Yang Berkualitas

Peneliti dalam penelitiannya tentang program LPMP dalam menciptakan guru yang berkualitas, peneliti menggunakan metode wawancara kepada beberapa informan, banyak hal yang peneliti temui di lapangan sewaktu mengadakan wawancara, ada beberapa informan yang susah untuk ditemui jadi wawancara menjawab melalui email maupun *messenger*, peneliti memiliki kesulitan untuk bertatap muka langsung dengan informan, tetapi setelah saya jelaskan bahwa ingin memberikan wawancara untuk tugas akhir mengenai program LPMP dalam menciptakan guru yang berkualitas mereka pun menerima dan menjawab bisa melalui email atau massenger, yang menjadi informan saya terdapat delapan ada yang dari kepala seksi FPMP, pensiunan widyaiswara, ketua MGMP, koor pengawasan dan widyaiswara, saya mewawancarai dengan maksud untuk mereka menceritakan program LPMP dalam menciptakan guru yang berkualitas.

Ibu Rina Harjanti Sujitno, M.Pd sebagai Kepala Seksi FPMP yang sedang melanjutkan S2 di PEP UNJ, saat melakukan wawancara penelitian peneliti memilih hari sabtu tanggal 27 April 2016, karena dianggap waktu yang tepat untuk melakukan wawancara kepada Ibu Rina Harjayanti Sujitno, M.Pd dimana beliau mewakili dari

Ketua Seksi FPMP yang bersedia diwawancarai, salah satu hasil wawancara dari Ibu Rina Harjayanti Sujitno, M.Pd.

“LPMP merupakan suatu lembaga yang didalamnya terdapat unit kerja perlengkapan. Salah satu tugas unit kerja perlengkapan yakni menangani proses pengadaan dan pengeluaran barang inventaris. Dengan adanya aplikasi sistem informasi, unit kerja perlengkapan dapat melakukan pengadaan inventarisasi suatu barang menggunakan suatu aplikasi yang disebut SIMAK BMN agar diperoleh efektivitas dan efisiensi kerja dalam melakukan proses pengadaan dan pengeluaran barang. Tetapi kendala yang dihadapi yaitu aplikasi yang digunakan oleh unit kerja perlengkapan hanya dapat diakses oleh unit kerja itu sendiri, sedangkan unit kerja lain tidak dapat mengaksesnya. Akibatnya jika ada kebutuhan akan barang inventaris baru dari salah satu unit kerja tidak bisa langsung diketahui dan ditindaklanjuti oleh unit kerja perlengkapan.”³⁹

Hasil wawancara dari Ketua Seksi FPMP peneliti melihat bahwa Ibu Rina Harjanti Sujitno, M.Pd ini merasa program LPMP dalam pengadaan dan pengeluaran barang inventaris sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja dalam melakukan proses pengadaan dan pengeluaran barang yang merupakan salah satu dari LPMP yang didalamnya terdapat unit kerja perlengkapan.

Begitu pula wawancara berikutnya dari Dra. Enny Sukilas, M.Si selaku Ketua MGMP yang bersedia diwawancarai, salah satu hasil wawancara dari beliau bahwa:

“Program LPMP dalam menciptakan guru yang berkualitas dengan cara membuat project sendiri dan dikerjakan sendiri karena kurangnya pembiayaan, tetapi pada saat ini ada program yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan yang diberikan kepada LPMP untuk dijalankan dan diberikan dana dari pihak Kementerian Pendidikan”.⁴⁰

Pernyataan Ketua MGMP peneliti melihat bahwa Dra. Enny Sukilas, M.Si ini merasa kurangnya pembiayaan dalam program LPMP dalam menciptakan guru yang berkualitas sehingga agak sulit untuk mempraktikkan atau menjalankan program

³⁹ Wawancara dengan Ibu Rina Harjanti Sujitno, M.Pd, tanggal 24 April 2016. Pkl 15.58 WIB.

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Dra. Enny Sukilas, M.Si, tanggal 20 April 2016. Pkl 10.30 WIB

yang telah dibuat tetapi dengan minimnya biaya tetap dijalankan untuk menciptakan guru yang berkualitas khususnya DKI Jakarta.

Menurut Bapak Harry Prada Muda Karana, SH selaku Koor Pengawasan yang bersedia di wawancarai, salah satu hasil wawancara beliau sebagai berikut:

“Dalam sektor pendidikan, pendidik merupakan pemegang peran yang amat penting. Guru adalah jantungnya pendidikan. Tanpa denyut dan peran aktif guru serta kebijakan pembaruan pendidikan secanggih apapun tetap akan sia-sia tanpa guru yang berkualitas tidak akan membuahkan hasil optimal. Program LPMP dalam menciptakan guru yang berkualitas dengan cara sertifikasi guru, bekerjasama dengan KKG/MGMP”.⁴¹

Hasil wawancara dari Koor Pengawasan peneliti melihat bahwa Bapak Harry Prada Muda Karana, SH ini merasa program LPMP dalam meningkatkan kompetensi guru harus benar-benar di maksimalkan untuk mendapatkan guru yang berkualitas, karena pendidikan yang baik dan unggul tetap akan tergantung pada kondisi mutu guru.

Menurut Bapak Drs. Sudirman selaku widyaiswara yang bersedia di wawancarai, salah satu hasil wawancara beliau sebagai berikut:

“Program LPMP dalam menciptakan guru yang berkualitas dengan cara melakukan sertifikasi guru yang dijalankan saat ini dilandasi oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Tujuan dari program sertifikasi guru ini untuk mengakomodir berbagai kompetensi yang harus dimiliki guru agar dapat memenuhi standar guru profesional dan berkualitas”.⁴²

Hasil wawancara dari widyaiswara peneliti melihat bahwa Bapak Drs. Sudirman ini merasa program LPMP dalam sertifikasi guru sudah sangat tepat karena dari salah satu program LPMP ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi guru

⁴¹ Wawancara dari Bapak Harry Prada Muda Karana, SH, pada tanggal 19 April 2016. Pkl 10.00 WIB.

⁴² Wawancara dari Bapak Drs. Sudirman pada tanggal 11 April 2016. Pkl 13.22 WIB.

yang harus dimiliki agar dapat memenuhi standar guru profesional dan berkualitas.

Program LPMP dalam membentuk guru yang lebih profesional telah dijelaskan oleh Ibu Susi Budiarti, M.Pd selaku widyaiswara yang bersedia di wawancari, salah satu hasil wawancara sebagai berikut:

“Salah satu program LPMP dalam menciptakan guru yang berkualitas dengan mengadakan sertifikasi guru yang bertujuan memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada guru. Selain sertifikasi guru program dari LPMP yaitu melakukan pendidikan pelatihan singkat dengan biaya dari pemerintah yang dikenal dengan Continuous Professional Development (CPD)”⁴³

Hasil wawancara dari widyaiswara peneliti melihat bahwa Bapak Ibu Susi Budiarti, M.Pd ini merasa program LPMP dalam sertifikasi guru sudah sangat baik karena memberikan kesejahteraan guru yang lebih baik, tetapi selain sertifikasi guru program LPMP juga melakukan pendidikan pelatihan singkat yang bertujuan untuk meningkatkan guru yang berkualitas.

Program LPMP dalam membentuk guru yang lebih profesional telah dijelaskan oleh Dra. Kun Maryati, SH selaku Pensiunan Widyaiswara yang bersedia di wawancari, salah satu hasil wawancara sebagai berikut:

“Program LPMP dalam melaksanakan tugas dalam Permendikbud, LPMP menyelenggarakan fungsi pemetaan mutu, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu, supervisi satuan pendidikan, fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan, melaksanakan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan serta melaksanakan urusan administrasi LPMP”⁴⁴

⁴³ Wawancara dari Ibu Susi Budiarti, M.Pd tanggal 11 April 2016. Pkl 13.40 WIB.

⁴⁴ Wawancara dari Ibu Dra. Kun Maryati tanggal 30 April 2016. Pkl 16.00 WIB.

Hasil wawancara dari widyaiswara peneliti melihat bahwa Ibu Dra. Kun Maryati merasa program LPMP dalam meningkatkan kompetensi guru sudah sesuai dengan Permendikbud yaitu menyelenggarakan fungsi pemetaan mutu, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu, supervisi satuan pendidikan, fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan, melaksanakan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan kepada guru-guru yang ada di seluruh propinsi khususnya DKI Jakarta.

Selain itu, program LPMP dalam membentuk guru yang lebih profesional juga dijelaskan oleh Nina Ratna Suminar, M.Si selaku Widyaiswara yang bersedia di wawancari, salah satu hasil wawancara sebagai berikut:

“Program LPMP dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru sudah seharusnya dilakukan oleh Pemerintah dan instansi lain yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan profesi guru. Di samping itu, dengan menetapkan guru tenaga profesional, maka sebagai seorang guru paling tidak harus memiliki empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional sehingga dapat meningkatkan kompetensi guru yang profesional”⁴⁵

Hasil wawancara dari widyaiswara peneliti melihat bahwa Ibu Nina Ratna Suminar ini merasa bahwa dalam meningkatkan kompetensi seorang guru sudah seharusnya dilakukan oleh Pemerintah serta seorang guru paling tidak harus memiliki empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Sedangkan menurut Bapak Dr. Kunandar selaku widyaiswara yang bersedia di wawancarai, salah satu hasil wawancara beliau sebagai berikut:

⁴⁵ Wawancara dari Ibu Nina Ratna Suminar, M.Si tanggal 30 April 2016. Pkl 16.00 WIB.

“Program LPMP untuk mencapai standar mutu dan profesionalisme guru seperti yang diharapkan harus melakukan upaya-upaya pembinaan terhadap guru secara terus menerus. Karena LPMP mempunyai tugas dalam pembinaan dan peningkatan profesionalisme guru di Indonesia sehingga harus bertanggungjawab”.⁴⁶

Hasil wawancara dari widyaiswara peneliti melihat bahwa Bapak Dr Kunandar ini merasa bahwa mencapai standar mutu dan profesionalisme guru seperti yang diharapkan melalui pembinaan terhadap guru yang harus dilakukan secara terus menerus yang merupakan salah satu program dari LPMP untuk meningkatkan kompetensi guru yang profesional.

3.3 Tindakan LPMP Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru

Tindakan LPMP dalam upaya meningkatkan kompetensi guru merupakan hal yang utama. Kompetensi guru memiliki beberapa aspek kompetensi yaitu kompetensi pendidikan, kompetensi kepribadian, kompetensi professional dan kompetensi kemasyarakatan. Menurut Ibu Dra. Enny Sukilas, M.Si selaku Ketua MGMP yang bersedia di wawancara, salah satu hasil wawancara beliau adalah:

“Melihat rendahnya mutu pendidikan perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan, salah satunya adalah melakukan revitalisasi penyelenggaraan KKG/MGMP melalui penyusunan panduan penyelenggaraan KKG/MGMP dalam bentuk Buku Standar Pengembangan KKG/MGMP dan Buku Operasional Pelaksanaan KKG/MGMP. Dengan adanya panduan pelaksanaan KKG/MGMP ini kegiatan-kegiatan kelompok kerja guru dan musyawarah kerja mata pelajaran dapat lebih terarah dan dapat dijadikan wadah untuk pengembangan profesionalisme guru secara mandiri dan berkelanjutan mengenai peningkatan kompetensi guru”.⁴⁷

Pernyataan Ketua MGMP peneliti melihat bahwa Dra. Enny Sukilas, M.Si ini merasa bahwa upaya yang paling tepat untuk meningkatkan kompetensi guru dengan

⁴⁶ Wawancara dari Bapak Drs. Sudirman pada tanggal 11 April 2016. Pkl 13.22 WIB.

⁴⁷ Wawancara dari Bapak Dr. Kunandar, tanggal 11 April 2016. Pkl 13.30 WIB.

cara perbaikan dalam melakukan revitalisasi penyelenggaraan KKG/MGMP melalui penyusunan panduan penyelenggaraan dalam bentuk Buku Standar Pengembangan dan Buku Operasional Pelaksanaan KKG/MGMP. Menurut Bapak Drs. Sudirman selaku widyaiswara yang bersedia di wawancarai, salah satu hasil wawancara beliau sebagai berikut:

“Motivasi menjadi seorang widyaiswara karena ingin membantu dalam bidang pendidikan. Kualitas guru secara umum dari sebagian negara-negara masih kurang tetapi LPMP sedang melakukan tindakan untuk memperbaikinya agar kualitas guru di propinsi dapat meningkatkan kompetensi guru melalui LPMP karena setiap propinsi memiliki satu LPMP. Sebagai widyaiswara telah diutamakan untuk dilatih menjadi guru yang professional”.⁴⁸

Pernyataan Bapak Drs. Sudirman selaku widyaiswara tindakan LPMP dalam meningkatkan kompetensi guru sudah sangat bagus karena sebagai widyaiswara telah diutamakan untuk dilatih menjadi guru yang professional, namun kendala yang dihadapi dari tindakan ini adalah sistem yang tidak ada kesinambungan seperti habis penataran di lepas begitu saja, pemantauannya kurang, dan praktek di lapangan kurang di kontrol secara optimal.

Menurut Bapak Dr. Kunandar selaku widyaiswara yang bersedia di wawancarai, salah satu hasil wawancara beliau sebagai berikut:

“Dalam meningkatkan kompetensi guru tindakan dari LPMP dibantu oleh saya selaku widyaiswara dalam membantu memecahkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi di lapangan, sehingga dapat menyelesaikan masalah terkait dengan kesulitan yang dihadapi oleh guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas meningkatkan mutu di sekolah. Dalam hal ini widyaiswara harus dapat meningkatkan kompetensi seorang guru yang meliputi kompetensi pengelolaan pembelajaran, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi substantive”.⁴⁹

⁴⁸ Wawancara dari Bapak Drs. Sudirman pada tanggal 11 April 2016. Pkl 13.22 WIB.

⁴⁹ Wawancara dari Bapak Dr. Kunandar pada tanggal 11 April 2016. Pkl 13.30 WIB.

Hasil wawancara dari Widyaiswara peneliti melihat bahwa Bapak Dr. Kunandar ini merasa program LPMP dalam meningkatkan kompetensi guru harus benar-benar di maksimalkan untuk mendapatkan guru yang berkualitas dapat meningkatkan mutu di sekolah. Peran LPMP dalam meningkatkan kompetensi seorang guru meliputi kompetensi pengelolaan pembelajaran, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi substantive.

Mengenai tindakan LPMP dalam membentuk guru yang lebih professional telah dijelaskan oleh Ibu Susi Budiarti, M.Pd selaku widyaiswara yang bersedia di wawancari, salah satu hasil wawancara sebagai berikut:

“Dengan melihat mutu dan kompetensi guru di Indonesia yang masih dianggap rendah. Beragam alasan yang dianggap sebagai penyebab hal tersebut, antara lain, terkait dengan rendahnya kompetensi guru ini dan rendahnya kualitas pendidikan guru. Terkait dengan rendahnya kompetensi guru secara tidak langsung mempengaruhi mutu pendidikan guru seperti tingkat kesejahteraan guru, pendidikan dan pelatihan guru, dan pembinaan yang diberikan kepada guru, maka LPMP harus terus menerus mengadakan pembinaan terhadap guru”⁵⁰

Hasil wawancara dari widyaiswara peneliti melihat bahwa Ibu Susi Budiarti, M.Pd ini merasa mutu dan kompetensi guru di Indonesia yang masih dianggap rendah dengan beragam alasan penyebabnya, maka LPMP harus melakukan tindakan dengan cara terus menerus malakukan pembinaan terhadap guru.

Sedangkan dalam kompetensi guru tindakan yang dilakukan LPMP telah dijelaskan oleh Dra. Kun Maryati selaku Pensiunan Widyaiswara yang bersedia di wawancari, salah satu hasil wawancara sebagai berikut:

⁵⁰ Wawancara dari Ibu Susi Budiarti, M.Pd tanggal 11 April 2016. Pkl 13.40 WIB.

“Upaya-upaya pengembangan karir yang dilakukan LPMP harus dapat meningkatkan kompetensi guru, agar karir seorang guru berkembang secara maksimal LPMP harus melakukan upaya-upaya dengan cara menghadiri atau berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah profesional seperti seminar, symposium, pelatihan, selain itu membuat karya ilmiah serta melaksanakan penelitian kerja profesional baik individu maupun kolaboratif dengan melakukan *Lesson Study*, Penelitian Tindakan Kelas”⁵¹

Hasil wawancara dari widyaiswara peneliti melihat bahwa Ibu Dra. Kun Maryati merasa bahwa dalam meningkatkan kompetensi guru LPMP harus melakukan upaya-upaya terhadap guru untuk dapat menghadiri kegiatan ilmiah profesional seperti seminar, symposium, pelatihan, selain itu membuat karya ilmiah dan melaksanakan penelitian kerja profesional yaitu *Lesson Study* dan PTK.

3.4 Peran LPMP Dalam Membentuk Guru Yang Lebih Professional

Peranan merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan atau lembaga yang menempati atau mengaku suatu posisi dalam sistem sosial. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan adalah penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan nasional. Lembaga ini merupakan UPT pusat di lingkungan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas. Sebagai lembaga penjaminan mutu, LPMP telah memiliki sejumlah tenaga struktural dan tenaga fungsional, fasilitas, dan berbagai program. LPMP juga memiliki visi, misi, dan tujuan, serta tugas pokok dan fungsi yang diformulasi sesuai dengan kebutuhan pemekaran organisasi dan manajemen pada era otonom. Semua ini diharapkan dapat

⁵¹ Wawancara dari Ibu Dra. Kun Maryati tanggal 30 April 2016. Pkl 16.00 WIB.

berfungsi sebagai acuan pengembangan berbagai kebijakan, program dan kegiatan lembaga yang mampu menjawab kebutuhan lapangan kerja yang terus berkembang, dan diharapkan kedepan LPMP mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara profesional. Menurut Ibu Dra. Enny Sukilas, M.Si selaku Ketua MGMP yang bersedia di wawancarai, salah satu hasil wawancara beliau adalah:

“LPMP mempunyai peran untuk melaksanakan penjaminan mutu di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan Nasional serta melakukan pemetaan mutu, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu, melakukan supervisi, dan fasilitasi sumberdaya pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dalam penjaminan mutu pendidikan. LPMP berada di setiap provinsi di Indonesia, dengan lingkup kerjanya meliputi seluruh provinsi di mana LPMP tersebut berada”⁵²

Hasil wawancara Ibu Dra. Enny Sukilas, M.Si selaku Ketua MGMP menjelaskan bahwa peran LPMP yaitu untuk melaksanakan penjaminan dan pemetaan mutu, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi, melakukan supervisi dan fasilitasi sumber daya agar kompetensi guru dapat meningkat.

Peran penting dari LPMP dalam membentuk guru yang lebih profesional telah dijelaskan oleh Ibu Susi Budiarti, M.Pd selaku widyaiswara yang bersedia di wawancarai, salah satu hasil wawancara sebagai berikut:

“Peranan LPMP kalau dilihat dari posisinya sangat penting karena LPMP posisi yang paling depan di daerah atau provinsi cuma tergantung dari pemberdayaan seperti program dari atasan. LPMP juga mempunyai peran penting dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas seorang guru di seluruh provinsi”⁵³

Pernyataan Ibu Susi Budiarti, M.Pd selaku widyaiswara, peneliti melihat bahwa peran LPMP mempunyai posisi yang sangat penting dalam meningkatkan

⁵² Wawancara dari Ibu Dra. Enny Sukilas, M.Si tanggal 20 April 2016. Pkl 10.30 WIB.

⁵³ Wawancara dari Ibu Susi Budiarti, M.Pd tanggal 11 April 2016. Pkl 13.40 WIB.

kompetensi seorang guru dalam meningkatkan pendidikan di seluruh Indonesia. Menurut Bapak Dr. Kunandar selaku Widyaiswara yang bersedia di wawancarai, salah satu hasil wawancara beliau sebagai berikut:

“Peran LPMP sangat penting dalam membentuk guru yang profesionalisme untuk menjalankan fungsi Kementerian Pendidikan yaitu mutu pendidikan dalam mencapai standar nasional pendidikan. LPMP memegang peran penting dan strategis guna merumuskan terobosan-terobosan inovatif yang memiliki nilai tambah bagi percepatan peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan, lintas sektor dan lintas daerah sehingga dapat membentuk guru yang profesional”.⁵⁴

Hasil wawancara salah seorang widyaiswara yaitu Bapak Dr. Kunandar di atas, peneliti melihat bahwa LPMP memegang peran penting dalam peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan serta membentuk guru yang profesionalisme. Menurut Bapak Drs. Sudirman selaku widyaiswara yang bersedia di wawancarai, salah satu hasil wawancara beliau sebagai berikut:

“Peran LPMP dalam pengembangan profesionalisme guru sangat penting karena peningkatan kinerja kelompok guru dan musyawarah guru mata pelajar merupakan masalah yang mendesak untuk dapat direalisasikan. Dalam membentuk guru yang professional berbagai upaya telah dilakukan diantaranya melalui berbagai pelatihan instruktur dan guru inti, meningkatkan sarana dan prasarana dan meningkatkan mutu manajemen”⁵⁵

Pernyataan salah seorang widyaiswara Bapak Drs. Sudirman ini merasa bahwa pengembangan profesionalisme guru sangat penting untuk dapat direalisasikan dengan cara melalui berbagai pelatihan instruktur, meningkatkan sarana dan prasarana serta meningkatkan mutu manajemen.

⁵⁴ Wawancara dari Bapak Dr. Kunandar pada tanggal 11 April 2016. Pkl 13.30 WIB.

⁵⁵ Wawancara dari Bapak Drs. Sudirman pada tanggal 11 April 2016. Pkl 13.22 WIB.

Menurut Dewi Wulan Sari “Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”.⁵⁶

Kompetensi merupakan gambaran hakikat kualitatif dari perilaku seseorang. Menurut Lefrancois, kompetensi merupakan kapasitas untuk melakukan sesuatu, yang dihasilkan dari proses belajar. Selama proses belajar stimulus akan bergabung dengan isi memori dan menyebabkan terjadinya perubahan kapasitas untuk melakukan sesuatu. Apabila individu sukses mempelajari cara melakukan satu pekerjaan yang kompleks dari sebelumnya, maka pada diri individu tersebut pasti sudah terjadi perubahan kompetensi. Perubahan kompetensi tidak akan tampak apabila selanjutnya tidak ada kepentingan atau kesempatan untuk melakukannya.⁵⁷

Menurut Hamzah B. Uno, kompetensi profesional guru adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajar. Adapun kompetensi profesional mengajar yang harus dimiliki oleh seorang yaitu meliputi kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem pembelajaran, serta kemampuan dalam mengembangkan sistem pembelajaran.⁵⁸

Salah satu kompetensi yang ditingkatkan oleh LPMP adalah meningkatkan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional karena kompetensi pedagogik

⁵⁶ Wulansari Dewi, 2009. *Sosiologi (Konsep dan Teori)* (Bandung: PT. Refika), Hlm.106.

⁵⁷ Lefrancois, G.R. 1995. *The Life Span* (4th ed). California. Hlm. 5.

⁵⁸ Hamzah, B. Uno. 2011. *Proses Belajar Mengajar* (Jakarta: Bumi Aksara), Hlm. 64

merupakan kompetensi yang sangat mutlak untuk dimiliki oleh seorang guru, pada dasarnya kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik, dimana kompetensi ini adalah yang membedakan antara profesi guru dengan profesi yang lainnya. Kompetensi pedagogik tidak diperoleh secara langsung, tetapi melalui upaya belajar secara terus-menerus dan sistematis, baik pada masa pra jabatan (pendidikan calon guru) maupun dalam masa jabatan yang didukung oleh bakat, minat dan potensi keguruan yang dimiliki masing-masing individu. Lalu didalam kompetensi pedagogik terdapat tujuh aspek diantaranya yaitu :

- a. Mengenai karakteristik anak didik
- b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran
- c. Mampu mengembangkan kurikulum
- d. Kegiatan pembelajaran yang mendidik
- e. Memahami dan mengembangkan potensi peserta didik
- f. Komunikasi dengan peserta didik
- g. Penilaian dan evaluasi pembelajaran

Selain itu yang terdapat pula kompetensi profesional yang di berkaitan erat dengan tugas-tugas guru dalam mengajar, mendidik dan membimbing. Kompetensi profesional berhubungan dengan profesi yang menuntut berbagai keahlian dibidang pendidikan atau keguruan. Kompetensi profesional merupakan kemampuan dasar guru dalam pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia, bidang studi yang

dibinanya, sikap yang tepat tentang lingkungan dan mempunyai ketrampilan dalam teknik mengajar.

3.5 Proses LPMP Dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik

Proses kompetensi pedagogik yang diberikan LPMP kepada guru dengan cara memberikan pengajaran untuk dapat menguasai ilmu mengajar, mengenal siswa dan lingkungan masyarakat, menguasai teori motivasi, penyusunan kurikulum, penyusunan RPP dan pengetahuan evaluasi pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kompetensi guru.

3.6 Proses LPMP Dalam Meningkatkan Kompetensi Professional

Kompetensi guru ialah sejumlah kemampuan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tingkatan guru profesional. Proses peningkatan profesionalisme guru melalui kompetensi pedagogik antara lain: guru harus menguasai landasan mengajar, menguasai ilmu mengajar (didaktik metodik), mengenal siswa, menguasai teori motivasi, mengenal lingkungan masyarakat, menguasai penyusunan kurikulum, menguasai teknik penyusunan RPP, menguasai pengetahuan evaluasi pembelajaran, dan lain-lain.

Kompetensi profesional guru adalah sejumlah kompetensi yang berhubungan dengan profesi yang menuntut berbagai keahlian di bidang pendidikan atau keguruan. Kompetensi profesional merupakan kemampuan dasar guru dalam pengetahuan

tentang belajar dan tingkah laku manusia, bidang studi yang dibinanya, sikap yang tepat tentang lingkungan PBM dan mempunyai keterampilan dalam teknik mengajar.

Proses kompetensi professional yang diberikan LPMP kepada guru dengan cara memberikan pembelajaran sains, penguasaan materi, struktur, konsep dan pola keilmuan yang mendukung pelajaran yang diampuh serta mengembangkan keprofesian melalui tindakan mengulang pembelajaran apa yang sudah dijelaskan untuk diulang kembali sehingga dapat meningkatkan kompetensi guru.

3.7 Penutup

Pada bab ini dijelaskan adanya peran LPMP dalam meningkatkan kompetensi guru. LPMP dalam meningkatkan kompetensi seorang guru melalui pembinaan terhadap guru yang meliputi beberapa unsur yaitu sertifikasi guru, pelatihan per jenjang bagi guru, penilaian per jenjang dan pengembangan profesi guru yang meliputi pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif yang dihasilkan oleh guru yang bersangkutan serta melakukan *lesson study*, Penelitian Tindakan Kelas (PTK).

Peran LPMP dalam meningkatkan kompetensi guru harus terus dilakukan karena dengan melihat mutu dan kompetensi guru di Indonesia yang masih dianggap rendah. Beragam alasan yang dianggap sebagai penyebab hal tersebut, antara lain, terkait dengan rendahnya kompetensi guru ini dan rendahnya kualitas pendidikan guru. Terkait dengan rendahnya kompetensi guru secara tidak langsung

mempengaruhi mutu pendidikan guru seperti tingkat kesejahteraan guru, pendidikan dan pelatihan guru, dan pembinaan yang diberikan kepada guru, maka LPMP harus terus menerus mengadakan pembinaan terhadap guru.

LPMP mempunyai peran untuk melaksanakan penjaminan mutu di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta melakukan pemetaan mutu, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu, melakukan supervisi, dan fasilitasi sumberdaya pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dalam penjaminan mutu pendidikan. LPMP berada di setiap provinsi di Indonesia, dengan lingkup kerjanya meliputi seluruh provinsi di mana LPMP tersebut berada.

Skema 3.1
Kerangka Temuan Peran LPMP



Sumber : Hasil Analisis, 2016

BAB IV

DINAMIKA PENGUATAN GURU DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU

4.1. Pengantar

LPMP adalah penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan nasional. Lembaga ini merupakan UPT pusat di lingkungan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas.

Peran LPMP terkait guru antara lain di atur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pada Pasal 33 disebutkan bahwa penentuan kebijakan strategis dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, dalam Pasal 34 dinyatakan pemerintah dan Pemda mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru, oleh karena itu Pemerintah dan Pemda mempunyai kewajiban untuk menyediakan anggaran peningkatan profesionalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan atau sekolah. Pemerintah Pusat adalah Kemendikbud dan Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Pengembangan dan peningkatan kompetensi dimaksud dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan

perolehan angka kredit jabatan fungsional. Pembinaan dan pengembangan keprofesian guru meliputi pembinaan kompetensi-kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sementara itu, pembinaan dan pengembangan karier meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Upaya pembinaan dan pengembangan karir guru ini harus sejalan dengan jenjang jabatan fungsional mereka. Pola pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru tersebut.

Pengembangan profesi dan karir diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam rangka pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Inisiatif meningkatkan kompetensi dan profesionalitas ini harus sejalan dengan upaya untuk memberikan penghargaan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap guru. Seperti telah dijelaskan di atas, Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2005 tentang Guru mengamanatkan bahwa terdapat dua alur pembinaan dan pengembangan profesi guru, yaitu: pembinaan dan pengembangan profesi, dan pembinaan dan pengembangan karir. Pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional. Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud dilakukan melalui jabatan fungsional.

Upaya perbaikan di bidang pendidikan merupakan suatu keharusan untuk selalu dilaksanakan agar masyarakat dapat maju dan berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa upaya dilaksanakan antara lain penyempurnaan kurikulum, peningkatan kompetensi guru melalui penataran-

penataran, perbaikan sarana-sarana pendidikan, dan lain-lain. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk menyiapkan manusia menghadapi masa depan agar hidup lebih sejahtera, baik sebagai individu maupun secara kolektif sebagai warga masyarakat. Fenomena ini ditandai dari rendahnya mutu lulusan, penyelesaian masalah pendidikan yang tidak tuntas. Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional di Pasal 3 tertulis bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Hal ini harus dibarengi dengan peningkatan mutu tenaga pendidik dan pendidikan dalam segi rekrutmen, kompetensi dan manajemen pengembangan sumber daya manusianya.

4.2 Peran dan Dinamika Widyaiswara

Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggungjawab, wewenang untuk mendidik, mengajar dan atau melatih PNS pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).

Widyaiswara dicalonkan secara internal dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan penempatan dalam lingkungan instansi dari pejabat yang

mengangkat melalui surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara setelah calon widyaiswara dinyatakan lulus syarat administrasi dan uji atau evaluasi kompetensi melalui paparan spesialisasi mata diklat. Seorang widyaiswara dapat menguasai rincian tugas tersebut di atas apabila telah mengikuti Diklat Fungsional Kewidyaiswaraan Berjenjang dan Diklat Teknis Kewidyaiswaraan. Diklat Fungsional Kewidyaiswaraan Berjenjang meliputi Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang tingkat pertama, muda, madya dan utama.

Pendidikan untuk orang dewasa merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan. Orang dewasa sebagai pembelajar dalam kegiatan pembelajaran tidak dapat diperlakukan seperti anak-anak didik biasa yang sedang duduk di bangku sekolah. Oleh sebab itu, orang dewasa yang tumbuh sebagai pribadi dan memiliki kematangan konsep diri bergerak dari ketergantungan seperti yang terjadi pada masa kanak-kanak menuju kearah kemandirian. Widyaiswara sebagai pengampu atau pemberi materi pada lembaga pendidikan dan pelatihan diharapkan menguasai metode-metode pembelajaran yang berwawasan pada kemampuan secara psikologis orang dewasa dalam menerima materi pembelajaran. Orang dewasa pada hakikatnya adalah makhluk yang kreatif, bilamana seseorang mampu menggerakkan atau menggali potensi yang ada dalam diri mereka.

Lembaga Diklat Pemerintah adalah satuan organisasi pada Departemen Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi, Tinggi Negara dan Perangkat Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan pengelolaan

Diklat. Pengelolaan Diklat merupakan proses kegiatan berupa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian monitoring dan evaluasi guna meningkatkan kompetensi atau kemampuan PNS dalam suatu jabatan untuk menyelenggarakan pemerintahan ,dan pembangunan secara efisien dan efektif.

Peningkatan kompetensi peserta diklat baik (*knowledge, attitude dan skill*) akan terwujud manakala penyelenggaraan kegiatan Diklat terutama dalam proses pembelajaran terlaksana secara efektif dan efisien. Sebab melalui proses pembelajaran inilah transfer dan transform pengetahuan yang berimplikasi pada perubahan perilaku dilakukan. Menurut Suparman mengutip pendapat Gagne mengatakan Pembelajaran adalah suatu sistem dimana komponen-komponen yang terdapat didalamnya saling berinteraksi, berinterelasi dan bersinergi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan⁵⁹.

Widyaiswara sebagai tenaga pendidik memiliki peran dan fungsi yang sangat menentukan kualitas setiap kegiatan Diklat. Widyaiswara tidak hanya berfungsi mengajar, mendidik dan melatih dalam arti sempit namun ia juga berfungsi sebagai fasilitator, moderator, konsultan, dinamisator, inspirator, peneliti dan bahkan harus mampu sebagai pemimpin dan pengayom serta pelayan. Dengan kata lain widyaiswara memiliki peran sangat penting dalam mewujudkan kualitas pembelajaran pada suatu diklat. Sementara kualitas pembelajaran merupakan sebagai penentu dari kualitas pendidikan.

⁵⁹ Atwi Suparman.2001. *Desain Instruksional* (Jakarta: Pengembangan Aktivitas Instruksional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas), Hlm 56.

Dalam mengkaji kelompok jabatan fungsional di LPMP penulis menggunakan perspektif struktural fungsional Robert K. Merton. Karena fokus Merton menjelaskan bahwa analisis Struktural Fungsional ialah pada fungsi-fungsi sosial dalam kelompok, organisasi, lembaga, masyarakat dan kebudayaan.⁶⁰ Fungsi yang dimaksud Merton adalah akibat-akibat yang dapat diamati menuju adaptasi atau penyesuaian dalam suatu sistem.⁶¹ Akibat-akibat yang dimaksud dalam fungsi sosial memiliki sifat positif dan negatif.

Fungsi positif merupakan bagian dari konsep fungsionalisme. Sifat negatif merupakan bagian dari disfungsi. Fungsionalis menurut Merton didefinisikan sebagai “konsekuensi-konsekuensi” yang disadari dan yang menciptakan adaptasi atau penyesuaian suatu sistem. Namun, jelas terdapat bias ideologis ketika orang hanya memusatkan perhatiannya pada adaptasi atau penyesuaian. Sedangkan disfungsi menurut gagasan Merton ketika struktur atau institusi dapat memberikan kontribusi pada terpeliharanya bagian lain sistem sosial lain, mereka pun dapat mengandung konsekuensi negatif bagi bagian-bagian lain tersebut.⁶²

Regulasi Widyaiswara berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut: nilai dasar, kode etik dan kode perilaku; komitmen, integritas moral,

⁶⁰ George Ritzer.2011. *Teori Sosiologi dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Teori Post modern* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), Hlm 269.

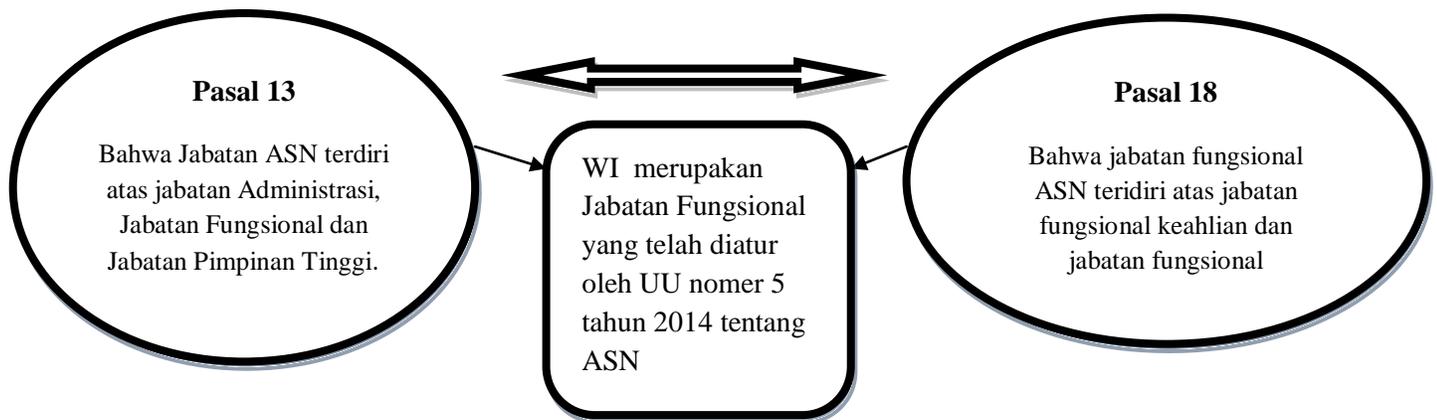
⁶¹ George Ritzer. 2012. *Sosiologi Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: Raja Grafindo Persada). Hlm 22.

⁶² George Ritzer,*op.cit*, Hlm. 269

dan tanggung jawab pada pelayanan publik; kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; kualifikasi akademik; jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan profesionalitas jabatan. Lihat skema 4.1.

Skema 4.1

Posisi WI Berdasarkan UU Nomer 5 Tahun 2014 tentang ASN

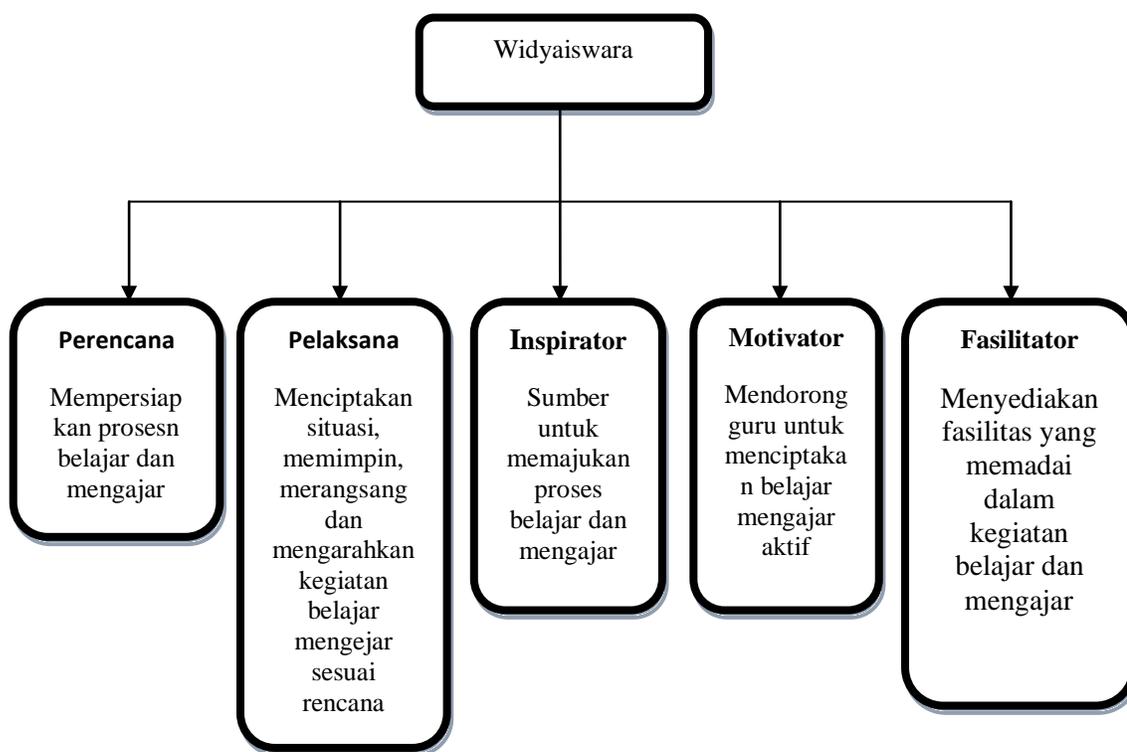


Sumber : Hasil Analisis (2016)

Eksistensi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) secara ringkas diartikulasikan dalam Pasal 13 UU ASN tersurat bahwa jabatan ASN terdiri atas jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Dan Pada Pasal 18 mengutarakan bahwa jabatan fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan fungsional keahlian, dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud terdiri atas ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama. Jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud terdiri atas penyelia, mahir, terampil dan pemula.

Semua regulasi ini hendaknya tidak sekedar menjadi payung hukum bagi keberadaan widyaiswara sebagai salah satu Jabatan Fungsional Tertentu, namun hendaknya menjadi panduan dalam membina dan mengembangkannya secara optimal sebagai bagian dari keluarga besar Aparatur Sipil Negara.

Skema 4.2
Peran Widyaiswara dalam Meningkatkan Kompetensi Guru



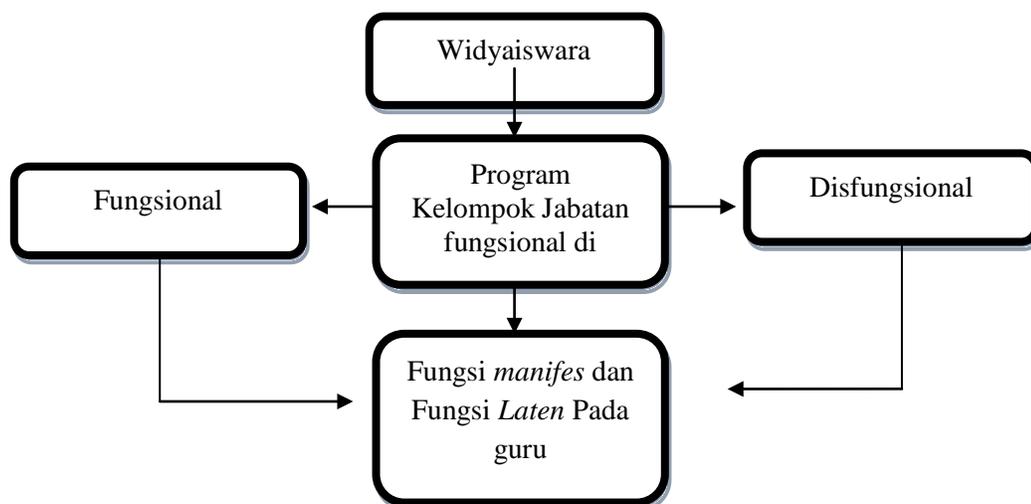
Sumber : Hasil Analisis (2016)

Hamzah B. Uno berdasarkan komisi kurikulum bersama P3G menetapkan dan merumuskan bahwa kompetensi profesional guru di Indonesia terdiri atas 10 kompetensi, yakni: (1) menguasai bahan pelajaran, (2) mengelola program pembelajaran, (3) mengelola kelas, (4) menggunakan media dan sumber belajar, (5)

menguasai landasan pendidikan, (6) mengelola interaksi belajar mengajar, (7) menilai prestasi belajar, (8) mengenal fungsi dan layanan bimbingan dan penyuluhan, (9) mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, dan (10) memahami dan menafsirkan hasil penelitian guna keperluan pengajaran.

Dalam kaitannya dengan kelompok jabatan fungsional di LPMP memiliki fungsional dan disfungsional. Fungsional dan disfungsional ini akan menciptakan adanya fungsi manifes dan fungsi laten. Lihat Skema 4.3.

Skema 4.3
Dinamika Penguatan Guru Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru



Sumber : Hasil Analisis (2016)

Kelompok jabatan fungsional adalah salah satu unit kerja yang terdapat di dalam struktur LPMP kelompok jabatan fungsional adalah nama lain dari widyaiswara, widyaiswara sendiri bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang untuk mendidik, mengajar, dan melatih PNS pada lembaga pendidikan pemerintah. Dalam fungsinya banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh kelompok jabatan

fungsional ini dalam upayanya meningkatkan mutu dan kompetensi pendidikan khususnya di Propinsi DKI Jakarta. Upaya yang dilakukan oleh Widyaiswara sebagai Kelompok Jabatan Fungsional adalah memberikan sebuah pendidikan dan pelatihan yang ditujukan untuk guru-guru dalam meningkatkan kompetensinya. Diklat yang dilakukan berisi tentang pembelajaran berbasis IT, Penyusunan Rencana Pembelajaran, program induksi, inovasi pendayagunaan media dalam pembelajaran dan pembelajaran untuk semua. Diklat seperti ini umumnya sangat dibutuhkan oleh guru-guru mengingat nantinya ketika mereka telah selesai mendapatkan pendidikan dan pelatihan bisa diterapkan ketika nanti mereka berada disekolah.

Upaya pengembangan diri yang dilakukan oleh Kelompok Jabatan Fungsional kepada guru bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru itu sendiri, dan hal ini sudah terprogram oleh LPMP dan Widyaiswara yang turun langsung dalam pelaksanaan program tersebut. Biasanya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut LPMP bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi memilih guru dari setiap sekolah yang akan dipanggil untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan diri oleh LPMP melalui Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam kaitannya antara Struktural Fungsional dengan Kelompok Jabatan Fungsional adalah bagaimana Kelompok Jabatan Fungsional ini menjalankan tugas-tugas yang telah diberikan oleh LPMP, menurut pendapat Robert K. Merton para Fungsionalis Struktural cenderung lebih memusatkan perhatiannya pada fungsi-

fungsi sebuah struktur atau institusi. Fokus pada fungsionalis struktural harus diarahkan pada fungsi-fungsi sosial ketimbang pada motif individu, ia menyatakan bahwa objek apa pun yang dapat dianalisis secara struktural fungsional harus merepresentasikan unsur-unsur standar (yaitu, yang terpola dan berulang). Merton menyebut hal tersebut sebagai “peran sosial, pola-pola institusional, proses sosial, pola-pola kultural, emosi yang terpola secara kultural, norma sosial, organisasi kelompok, struktural sosial, dan alat kontrol sosial.”⁶³

Seperti pernyataan dari salah satu guru Sosiologi di SMA 109 dimana salah satu hasil wawancara dari Ibu Sri Haryati, M.Pd.

“Widyaiswara dalam memberikan pelatihan dan diklat sangat bermanfaat dalam menciptakan guru yang berkualitas dengan cara melaksanakan upaya pembinaan untuk peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan pada seluruh guru sehingga dapat berinteraksi dengan seluruh guru yang ada di Jakarta”⁶⁴

Dari pernyataan salah satu guru Sosiologi di SMA 109 peneliti melihat bahwa Ibu Sri Haryati, M.Pd menganggap bahwa widyaiswara dalam memberikan pelatihan atau diklat sangat bermanfaat atau mempunyai fungsi bagi seluruh guru-guru untuk meningkatkan kompetensi seorang guru. Selain itu dengan diadakan pelatihan dan diklat tersebut guru dapat saling berinteraksi dengan sesama guru melalui sistem sosial.

Menurut Talcott Parsons, sistem sosial terdiri dari beragam aktor individual yang berinteraksi satu sama lain dalam situasi yang setidaknya memiliki aspek fisik atau lingkungan, aktor yang cenderung termotivasi kearah “optimisasi kepuasan” dan

⁶³ George Ritzer, *Op.cit.*, hal 269.

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Sri Haryati, M.Pd tanggal 21 Oktober 2016. Pkl 10.00 WIB.

yang hubungannya dengan situasi mereka, termasuk hubungan satu sama lain, didefinisikan dan diperantarai dalam bentuk sistem simbol yang terstruktur secara kultural dalam bentuk sistem simbol yang terstruktur secara kultural dan dimiliki bersama.⁶⁵

Sedangkan menurut pernyataan salah satu guru Bimbingan Konseling (BK) SMA 109 dimana salah satu hasil wawancara dari Ibu Tri Hanorawati, S.Pd sebagai berikut:

“Dengan diadakannya suatu program supervisi oleh widyaiswara yang dilakukan di sekolah dapat lebih menekankan kepada pembinaan dan peningkatan pada kemampuan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran dan penilaian proses pembelajaran, sehingga dengan program tersebut maka kompetensi guru dapat meningkat”⁶⁶.

Pernyataan salah satu guru BK di SMA 109 peneliti melihat bahwa Ibu Tri Hanorawati, S.Pd menganggap bahwa widyaiswara dalam memberikan supervisi dapat meningkatkan kompetensi guru yang harus benar-benar di maksimalkan untuk mendapatkan guru yang berkualitas, karena pendidikan yang baik dan unggul tetap akan tergantung pada kondisi mutu guru.

Fungsionalisme terstruktur pada kelompok jabatan fungsional yang dilakukan widyaiswara terhadap guru sangat penting. Para fungsionalis structural awal cenderung lebih memusatkan perhatiannya pada fungsi-fungsi sebuah struktur atau institusi. Namun menurut Merton, para analis awal itu cenderung mencampuradukkan

⁶⁵ George Ritzer dan Douglas J. Goodman. 2012. *Teori Sosiologi* (Bantul: Kreasi Wacana Offset), Hlm 259.

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Tri Hanorawati, S.Pd tanggal 25 Oktober 2016. Pkl 11.30 WIB.

motif-motif subjektif individu. Begitu juga dengan pernyataan salah satu guru Kimia di SMA 109 dimana salah satu hasil wawancara dari Ibu Ernawati, M.Pd sebagai berikut:

“Widyaiswara dalam menciptakan guru yang berkualitas dengan cara melakukan Sertifikasi guru yang dijalankan saat ini dilandasi oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Tujuan dari program Sertifikasi guru ini untuk mengakomodir berbagai kompetensi yang harus dimiliki guru agar dapat memenuhi standar guru profesional dan berkualitas serta dapat memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada guru”⁶⁷.

Pernyataan salah satu guru Kimia di SMA 109 peneliti melihat bahwa Ibu Ernawati, M.Pd menganggap bahwa setuju dengan cara widyaiswara dalam menciptakan guru yang berkualitas dengan menjalankan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi para guru untuk menaikkan jabatannya.

Sedangkan kaitannya antara Struktural disfungsional dengan Kelompok Jabatan Fungsional adalah bagaimana Kelompok Jabatan Fungsional ini menjalankan tugas-tugas yang telah diberikan oleh LPMP, menurut pendapat Merton ketika struktur atau institusi dapat memberikan kontribusi pada terpeliharanya bagian lain sistem sosial, sebagian guru mengandung konsekuensi negatif terhadap program yang dijalankan kelompok jabatan fungsional dari LPMP. Fungsi-fungsi positif lebih penting daripada disfungsi atau sebaliknya. Merton mengembangkan konsep keseimbangan mapan, manfaat konsep Merton terletak pada cara dia mengarahkan

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Ernawati, M.Pd tanggal 21 Oktober 2016. Pkl 11.00 WIB.

sosiolog untuk bertanya tentang signifikansi relatif.⁶⁸ Seperti pernyataan dari salah satu guru di SMA 109 dimana salah satu hasil wawancara dari Ibu Kasmawati, S.Pd

“Dalam agenda kerjanya untuk meningkatkan kompetensi professional guru dilaksanakan melalui kegiatan diskusi kecil, *sharing* dengan sesama teman guru dalam hal administrasi, pembelajaran, pembinaan prestasi, sedangkan yang lainnya bersifat pembinaan secara professional ditambahi dengan kegiatan ilmiah. Misalnya membuat penelitian tindakan kelas sebagai pelengkap penyempurnaan dari agenda peningkatan professional guru di Jakarta yang dilakukan widyaiswara tidak sepenuhnya berfungsi dengan baik karena tidak semua guru dapat membagi waktu untuk mengikuti kegiatan diskusi kecil tersebut”⁶⁹.

Pernyataan salah satu guru di SMA 109 peneliti melihat bahwa Ibu Kasmawati menganggap bahwa tidak setuju dengan cara widyaiswara dalam meningkatkan kompetensi professional guru melalui kegiatan diskusi kecil, karena tidak semua guru dapat mengikuti kegiatan diskusi tersebut. Begitu juga pernyataan dari salah satu guru di SMA 109 dimana salah satu hasil wawancara dari Ibu Anugrahati Handayani, S.Pd sebagai berikut:

“Kegiatan yang dilakukan widyaiswara dalam meningkatkan kompetensi guru melalui pendidikan pelatihan singkat dengan biaya dari pemerintah yang dikenal dengan *Continuous Professional Development* (CPD), tetapi hal tersebut tidak berjalan dengan baik karena terbenturnya pada anggaran biaya pada LPMP”⁷⁰.

Pernyataan salah satu guru di SMA 109 peneliti melihat bahwa Ibu Anugrahati Handayani, S.Pd menganggap bahwa pendidikan pelatihan singkat yang dilaksanakan widyaiswara terhadap guru tidak berjalan dengan lancar karena kurangnya biaya anggaran pada LPMP, sedangkan pendidikan yang diberikan kepada

⁶⁸George, Ritzer. *Op.Cit.* Hlm 270.

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Kasmawati, S.Pd tanggal 25 Oktober 2016. Pkl 11.40 WIB.

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Anugrahati Handayani, S.Pd tanggal 25 Oktober 2016. Pkl 11.44 WIB

guru untuk biaya ditanggung oleh pemerintah dalam meningkatkan kompetensi seorang guru.

Merton menunjukkan bahwa suatu struktur bisa jadi disfungsional bagi sistem secara keseluruhan namun mungkin saja terus ada. Bentuk-bentuk diskriminasi ini pun mempengaruhi pihak-pihak yang melakukan diskriminasi dengan membiarkan terlalu banyak orang berada di bawah perlindungan yang ketat dan meningkatnya kecenderungan konflik sosial.⁷¹

4.3 Kelemahan LPMP Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru

Kelemahan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dilihat dari widyaiswara bahwa kesejahteraan widyaiswara kurang diperhatikan karena insentif bulanan seorang widyaiswara masih disamakan dengan insentif yang diterima oleh seorang staf. Dan kurangnya pembinaan terhadap widyaiswara, karena disamping mengajar seorang widyaiswara juga harus sering belajar baik melalui buku-buku maupun dengan ikut diklat-diklat tetapi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dalam setahun belum tentu mengirimkan widyaiswara untuk mengikuti diklat sehingga widyaiswara bukannya pintar tetapi makin ketinggalan jaman. Karena kegiatan diklat tidak dapat diselenggarakan oleh LPMP sementara tupoksi widyaiswara adalah dikjartih (mendidik, mengajar, dan melatih) PNS.

⁷¹ George, Ritzer. *Op. Cit*, Hlm 272.

Peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilepaskan dengan upaya peningkatan mutu pendidikannya dan tenaga kependidikannya. Upaya peningkatan mutu pendidikan tidak akan memenuhi sasaran yang diharapkan tanpa dimulai dengan peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikannya. Upaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan tidak dapat dilepaskan dengan aspek-aspek penting sebagai berikut: 1) gaji dan standar kesejahteraan yang layak untuk kehidupannya, 2) standar kualifikasi, 3) standar kompetensi dan upaya peningkatannya, 4) sistem Sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan dan alih profesi yang tidak memenuhi standar kompetensi, seleksi atau rekrutmen yang jujur dan transparan, 5) standar pembinaan karir, 6) penyiapan calon guru dan tenaga kependidikan yang selaras dengan standar kompetensi, dan lebih menekankan praktik dan dengan teori yang kuat, 7) sistem diklat di lembaga *inservice training* dan pendidikan profesi di LPTK dan 8) pemberdayaan organisasi pembinaan profesional seperti Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) yang perlu diberdayakan.

4.4 Respon Guru

Guru seorang pengajar yang wajar ditiru dan dihormati oleh setiap peserta didik. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, guru sangat penting peranannya dalam penyelenggaraan tersebut, pasalnya semua materi pengajaran yang ada di

setiap sekolah semuanya disampaikan oleh guru. Dan agar setiap penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan lancar maka dibutuhkanlah guru yang berkualitas. Memang kualitas guru yang baik dan cemerlang akan membawa dampak yang baik pula pada kualitas pendidikan di Indonesia. Dan dalam hal ini pemerintah memang harus mengupayakan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan demi meningkatkan kualitas guru agar lebih baik. Pada saat ini memang kualitas guru agaknya menurun. Ini dikarenakan pemerintah yang kurang peduli akan nasib para guru, disamping itu gaji yang rendah, juga masalah atau kesibukan pribadi yang selalu mendera nasib para guru. Sehingga ini akan berdampak pula pada penurunan kualitas pendidikan di Indonesia.

Guru adalah orang yang berwenang dan bertanggung jawab atas pendidikan muridnya. Ini berarti guru harus memiliki dasar-dasar kompetensi sebagai wewenang dan kemampuan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu kompetensi harus mutlak dimiliki guru sebagai kemampuan, kecakapan dan ketrampilan mengelola pendidikan. Guru harus memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan atau yang dikenal dengan standar kompetensi guru. Standar ini diartikan sebagai suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan. Lebih lanjut Suparlan, menjelaskan bahwa “Standar kompetensi guru adalah ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan perilaku perbuatan bagi

seorang guru agar berkelayakan untuk menduduki jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi dan jenjang pendidikan.⁷²

Peningkatan kompetensi melalui Sertifikasi juga memberikan dampak pada meningkatnya kesejahteraan dalam hal tunjangan profesi. Guru-guru dengan gaji rendah, meskipun faktanya sampai saat ini juga masih terjadi tetapi sejak diberlakukannya program Sertifikasi ini, penghasilan guru meningkat. Apalagi jika di beberapa daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup tinggi, guru juga mendapatkan tunjangan kesejahteraan tambahan dari pemda setempat. Adapun 5 daerah yang memiliki PAD tertinggi di Indonesia, lihat Tabel 4.1

Tabel 4.1
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tertinggi Di Indonesia⁷³

No	Nama Daerah	Presentasi Rasio
1	DKI Jakarta	61,4 %
2	Bali	35,7%
3	Banten	32,4%
4	Jawa Timur	27,7%
5	Jawa Barat	26,6 %

Sumber : Arsip APBD KEMENKEU RI, 2011

Pada daerah yang memiliki PAD tinggi, seorang guru bisa mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 5 – 6 juta tiap bulan. Dalam hal ini diharapkan peningkatan tunjangan tersebut dapat mengakselerasi kualitas guru. Adanya tambahan penghasilan tersebut juga dapat sebagian dialokasikan untuk biaya studi lanjut di jenjang pascasarjana. Bisa juga dialokasi untuk membeli berbagai referensi tambahan yang mampu memperkaya bahan pengajaran di sekolah.

⁷² Suparlan.2002. *Guru Sebagai Profesi* (Yogyakarta: Hikayat), Hlm 85.

⁷³ Arsip APBD KEMENKEU RI 2011.

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), baik sebagai substansi materi ajar maupun piranti penyelenggaraan pembelajaran, terus berkembang. Dinamika ini menuntut guru selalu meningkatkan dan menyesuaikan kompetensinya agar mampu mengembangkan dan menyajikan materi pelajaran yang aktual dan dengan menggunakan berbagai pendekatan, metoda dan teknologi pembelajaran terkini.

Hingga kini masih banyak kalangan yang meragukan kompetensi guru baik dalam bidang studi yang diajarkan maupun bidang lain yang mendukung terutama bidang didaktik dan metodik pembelajaran. Keraguan ini cukup beralasan karena didukung oleh hasil uji kompetensi yang menunjukkan masih banyak guru yang belum mencapai standar kompetensi yang ditetapkan.

Melihat keberadaan pendidik dalam proses pendidikan, substansinya kompetensi pendidik menduduki posisi strategis dalam menentukan kualitas pendidikan, sehingga pemenuhan kompetensi pendidik menjadi suatu yang harus diupayakan, seiring dengan dinamika tuntutan masyarakat yang dinamis, yang memiliki kebutuhan untuk berubah. Sadar terhadap kondisi tersebut dan tuntutan profesionalnya yang terus berkembang, maka pengembangan kompetensi pendidik perlu terus diupayakan dengan melalui berbagai tahapan secara berjenjang.

Guru seorang pengajar yang wajar ditiru dan dihormati oleh setiap peserta didik. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, guru sangat penting peranannya dalam penyelenggaraan tersebut, pasalnya semua materi pengajaran yang ada di setiap sekolah semuanya disampaikan oleh guru. Dan agar setiap penyelenggaraan

kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan lancar maka dibutuhkanlah guru yang berkualitas. Memang kualitas guru yang baik dan cemerlang akan membawa dampak yang baik pula pada kualitas pendidikan di Indonesia. Dan dalam hal ini pemerintah memang harus mengupayakan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan demi meningkatkan kualitas guru agar lebih baik. Pada saat ini memang kualitas guru agaknya menurun. Ini dikarenakan pemerintah yang kurang peduli akan nasib para guru, disamping itu gaji yang rendah, juga masalah atau kesibukan pribadi yang selalu mendera nasib para guru. Sehingga ini akan berdampak pula pada penurunan kualitas pendidikan di Indonesia.

Guru adalah orang yang berwenang dan bertanggung jawab atas pendidikan muridnya. Ini berarti guru harus memiliki dasar-dasar kompetensi sebagai wewenang dan kemampuan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu kompetensi harus mutlak dimiliki guru sebagai kemampuan, kecakapan dan ketrampilan mengelola pendidikan. Guru harus memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan atau yang dikenal dengan standar kompetensi guru. Standar ini diartikan sebagai suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan. Lebih lanjut Suparlan, menjelaskan bahwa “Standar kompetensi guru adalah ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan perilaku perbuatan bagi seorang guru agar berkelayakan untuk menduduki jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi dan jenjang pendidikan.”⁷⁴

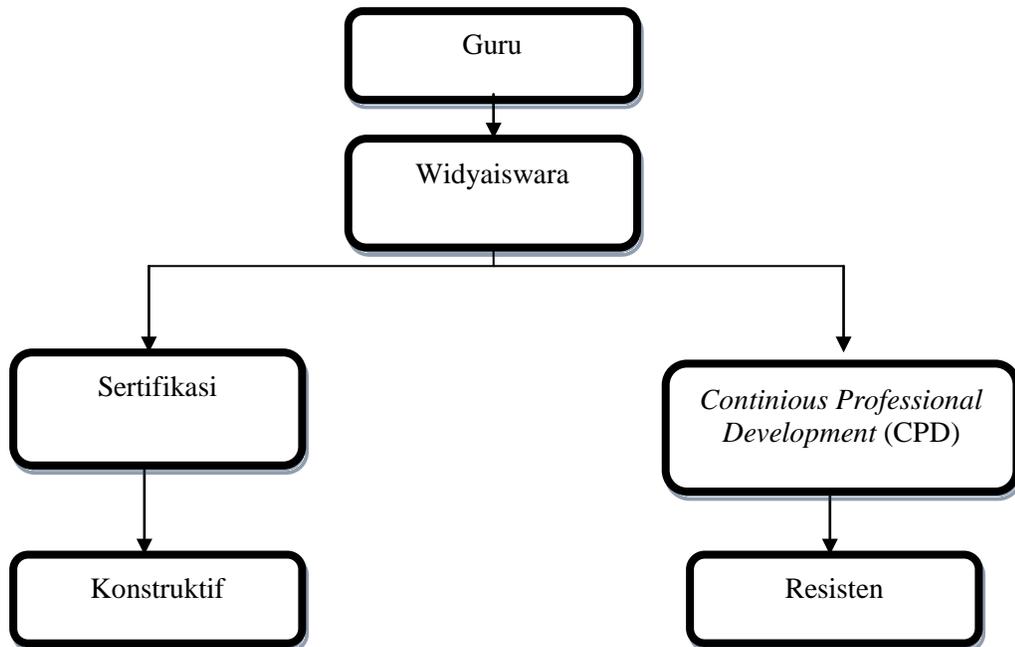
⁷⁴ Suparlan, *Op.cit* Hlm 85.

Secara sosiologis Merton melihat bahwa lembaga memiliki dua fungsi yaitu fungsi manifes dan laten. Fungsi manifest merupakan suatu kegiatan yang dikehendaki, seperti yang dilakukan LPMP yaitu meningkatkan kompetensi seorang guru melalui diklat, pendidikan, supervisi yang benar-benar bermanfaat dan menghasilkan bagi seorang guru. Sedangkan fungsi laten merupakan suatu kegiatan yang tidak dikehendaki, seperti menghasilkan begitu banyak kelas guru yang berfungsi meningkatkan status sosial guru di Jakarta, kaya atau miskin.

Gagasan ini terkait dengan konsep Merton yang lain yaitu konsekuensi yang tidak terantisipasi. Tindakan mengandung konsekuensi yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki. Meski setiap orang menyadari konsekuensi-konsekuensi yang dikehendaki tersebut, analisis sosiologi diperlukan untuk mengungkap konsekuensi-konsekuensi yang tidak dikehendaki, yang bagi beberapa kalangan justru menjadi inti dari sosiologi.⁷⁵

⁷⁵ George Ritzer, *Op.cit* Hlm 272.

Skema 4.4
Respon Guru Mengenai Peran Widyaiswara



Sumber : Hasil Analisis (2016)

4.5 Kaitan Teori Struktural Fungsionalisme Dengan Dinamika Penguatan Guru Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru

Lembaga pendidikan memberikan pengajaran dan ilmu-ilmu pengetahuan untuk para generasi muda penerus bangsa. Dalam hal ini, lembaga pendidikan bersifat fungsional, dan menjurus pada artian yang positif. Begitulah dalam kehidupan masyarakat, memang saling berkesinambungan, mempunyai suatu akibat dan fungsi-fungsi tersendiri. Teori fungsionalisme struktural mengutarakan bahwa masyarakat adalah suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian dan struktur-struktur

yang saling berkaitan dan saling membutuhkan keseimbangan, fungsionalisme struktural lebih mengacu pada keseimbangan. Dalam penelitian ini menilai bahwa semua sistem yang ada dalam guru pada hakikatnya mempunyai fungsi tersendiri. Suatu struktur akan berfungsi dan berpengaruh terhadap struktur lain.

Analisis struktural fungsional memusatkan perhatian pada kelompok, organisasi, masyarakat, dan kebudayaan. Objek apapun yang dapat dianalisis secara structural fungsional harus merepresentasikan unsur-unsur standar (yang terpola dan berulang). Fokus pada fungsionalis struktural harus diarahkan pada fungsi-fungsi sosial ketimbang pada motif individu. Sasaran studi Merton antara lain adalah : peran sosial, pola institional, proses sosial, pola kultur, emosi yang terpola secara kultural, norma sosial, organisasi kelompok, struktur sosial, alat-alat pengendalian sosial dan sebagainya.

Teori Fungsionalisme Struktural yang dikemukakan oleh Robert K. Merton ternyata memiliki perbedaan apabila dibandingkan dengan pemikiran pendahulu dangurunya, yaitu Talcott Parsons. Apabila Talcott Parsons dalam teorinya lebih menekankan pada orientasi subjektif individu dalam perilaku maka Robert K. Merton menitikberatkan pada konsekuensi-konsekuensi objektif dari individu dalam perilaku.

Merton menekankan tindakan-tindakan yang berulang kali atau yang baku yang berhubungan dengan bertahannya suatu sistem sosial dimana tindakan itu berakar. Dalam hal ini perhatian Merton lebih kepada apakah konsekuensi objektif tersebut memperbesar kemampuan sistem sosial untuk bertahan atau tidak, terlepas dari motif dan tujuan subjektivitas individu.

Fungsionalisme struktural berfokus pada fungsi-fungsi sosial daripada motif-motif individual. Fungsi-fungsi didefinisikan sebagai konsekuensi-konsekuensi yang diamati yang dibuat untuk adaptasi atau penyesuaian suatu sistem tertentu. Merton menunjukkan bahwa suatu struktur bisa jadi disfungsional bagi sistem secara keseluruhan namun mungkin saja terus ada. Bentuk-bentuk diskriminasi ini pun mempengaruhi pihak-pihak yang melakukan diskriminasi dengan membiarkan terlalu banyak orang berada di bawah perlindungan yang ketat dan meningkatnya kecenderungan konflik sosial

Secara sosiologis Merton melihat bahwa lembaga memiliki dua fungsi yaitu fungsi manifes dan laten. Fungsi manifest merupakan suatu kegiatan yang dikehendaki, seperti yang dilakukan LPMP yaitu meningkatkan kompetensi seorang guru melalui diklat, pendidikan, supervisi yang benar-benar bermanfaat dan menghasilkan bagi seorang guru. Sedangkan fungsi laten merupakan suatu kegiatan yang tidak dikehendaki, seperti menghasilkan begitu banyak kelas guru yang berfungsi meningkatkan status sosial guru di Jakarta, kaya atau miskin.

Gagasan ini terkait dengan konsep Merton yang lain yaitu konsekuensi yang tidak terantisipasi. Tindakan mengandung konsekuensi yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki. Meski setiap orang menyadari konsekuensi-konsekuensi yang dikehendaki tersebut, analisis sosiologi diperlukan untuk mengungkap konsekuensi-konsekuensi yang tidak dikehendaki, yang bagi beberapa kalangan justru menjadi inti dari sosiologi

Fungsi manifest merupakan suatu kegiatan yang dikehendaki, seperti meningkatkan kompetensi seorang guru melalui diklat, pendidikan, supervisi yang benar-benar bermanfaat dan menghasilkan bagi seorang guru. Sedangkan fungsi laten merupakan suatu kegiatan yang tidak dikehendaki, seperti menghasilkan begitu banyak kelas guru yang berfungsi meningkatkan status sosial guru di Jakarta, kaya atau miskin.

4.6 Penutup

Pada bab ini dijelaskan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebijakan LPMP.

Kebijakan LPMP melakukan supervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam melakukan upaya penjaminan mutu pendidikan. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), LPMP bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi. Menteri menerbitkan pedoman program penjaminan mutu satuan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

LPMP mempunyai peran untuk melaksanakan penjaminan mutu di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta melakukan pemetaan mutu, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu, melakukan supervisi, dan fasilitasi sumberdaya pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dalam penjaminan mutu pendidikan. LPMP berada di setiap provinsi di Indonesia, dengan lingkup kerjanya meliputi seluruh provinsi di mana LPMP tersebut berada.

Teori Fungsionalisme Struktural yang dikemukakan oleh Robert K. Merton ternyata memiliki perbedaan apabila dibandingkan dengan pemikiran pendahulu dangurunya, yaitu Talcott Parsons. Apabila Talcott Parsons dalam teorinya lebih menekankan pada orientasi subjektif individu dalam perilaku maka Robert K. Merton menitikberatkan pada konsekuensi-konsekuensi objektif dari individu dalam perilaku. Merton menekankan tindakan-tindakan yang berulang kali atau yang baku yang berhubungan dengan bertahannya suatu sistem sosial dimana tindakan itu berakar. Dalam hal ini perhatian Merton lebih kepada apakah konsekuensi objektif tersebut memperbesar kemampuan sistem sosial untuk bertahan atau tidak, terlepas dari motif dan tujuan subjektivitas individu.

Peran LPMP dalam meningkatkan kompetensi guru melalui kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik seorang guru melalui beberapa aspek antara lain: guru harus mengenal karakter peserta didik, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, guru mampu mengembangkan kurikulum, guru mampu menciptakan kegiatan pembelajaran yang mendidik, guru dapat mengembangkan potensi peserta didik, guru melakukan komunikasi dengan peserta didik, guru menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Seorang guru memiliki kompetensi pedagogik agar untuk dapat mengembangkan kemampuan anak didiknya dengan maksimal karena guru yang menguasai beberapa teori tentang pendidikan dengan mengerti bermacam-macam teori pendidikan dapat memilih mana yang paling baik untuk membantu perkembangan anak didiknya.

Peran LPMP dalam meningkatkan kompetensi seorang guru melalui pembinaan terhadap guru yang meliputi beberapa unsur yaitu sertifikasi guru, pelatihan per jenjang bagi guru, penilaian per jenjang dan pengembangan profesi guru yang meliputi pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif yang dihasilkan oleh guru yang bersangkutan serta melakukan *lesson study*, Penelitian Tindakan Kelas.

5.2 Saran

Peran LPMP dalam meningkatkan kompetensi guru harus terus dilakukan karena dengan melihat mutu dan kompetensi guru di Indonesia yang masih dianggap rendah. Beragam alasan yang dianggap sebagai penyebab hal tersebut, antara lain, terkait dengan rendahnya kompetensi guru ini dan rendahnya kualitas pendidikan

guru. Terkait dengan rendahnya kompetensi guru secara tidak langsung mempengaruhi mutu pendidikan guru seperti tingkat kesejahteraan guru, pendidikan dan pelatihan guru, dan pembinaan yang diberikan kepada guru, maka LPMP harus terus menerus mengadakan pembinaan terhadap guru.

Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebijakan LPMP.

Sebaiknya LPMP dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan diklat sehingga widyaiswara dapat terus meningkatkan kompetensi guru, selain itu juga harus meningkatkan fungsi administrasi widyaiswara untuk menyimpan dan melengkapi bahan-bahan angka kreditnya, meningkatkan budaya menulis di kalangan widyaiswara serta memudahkan syarat administrasi bagi widyaiswara untuk kenaikan pangkatnya serta menyelaraskan antara golongan dan tunjangan yang diterima seorang widyaiswara. Selain itu LPMP juga harus memperhatikan usia lanjut yang tidak layak untuk dijadikan widyaiswara karena akan mempengaruhi proses kerja widyaiswara. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka LPMP dapat meningkatkan kompetensi seorang guru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A, Piet. *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan*. Surabaya: Usaha, 2000.
- Bagong, Narwoko. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Craib, Ian. *Teori-Teori Sosial Modern : Dari Parsons Sampai Hebermas*. Jakarta: Rajawali , 1992.
- BPSDM. "Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru." *Jurnal Mutu Pendidikan*, 2011.
- Dewi, Wulansari. *Sosiologi (Konsep dan Teori)*. Bandung: Refika, 2009.
- Ihrom, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesi, 2004.
- Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Bandung: Mizan, 2001.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Lefrancois, G.R. *The Life Span* (4th ed). California. 1995.
- Maurice, Duverger. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Miles, and Huberman. *Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka, 1994.
- Mulyasa, E. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2004.
- _____. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Rosdakarya, 2007.
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992.
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Samana, A. *Profesionalisme Keguruan*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Sudjana, Nana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Suparlan. *Guru Sebagai Profesi*. Yogyakarta: Hikayat, 2002.
- Suparman, Atwi. 2001 *Desain Intruksional*. Jakarta : Pengembangan Aktivitas Intruksional, Dirjendikti, Depdiknas.
- Uno, Hamzah B. *Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- _____. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta : Bumi Aksara, 2011.
- Usman, Mohammad Uzer. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Wirawan. *Evaluasi Kinerja Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Yamin, Martinis. *Desain Pembelajaran Berbasis Komputer*. Jakarta: Direktorat Jenderal, 2007.
- Yasmin, Martinis. *Strategi Pembelajaran Berbasis Komputer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Zamroni. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: Biraf Publising, 2001.

Jurnal

- Asia society. "Teacher Quality: The 2013 International on the Teaching Profession Ministerie van Onderwijs." *Culture en Wetenschap*, 2013.
- M, Hatta. *Pengarahan Pada Penyenggaraan Metode Evaluasi Program ProDEP*. Bogor: Transkip, 2015.
- Mahargyanto, Bayu. "Peran MGMP Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Sosiologi." *Pendidikan Sosiologi*, 2009.
- Maliki, Zainudin, and Narasi Agung. *Tiga Teori Sosial Hegemonik*. Surabaya: Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat, 2003.

Tesis

Supamo. "Pengembangan Kompetensi Guru Taman Kanak-Kanak Dalam Perspektif Pendidikan Inklusif." *Tesis Pendidikan Anak*, 2011.

Internet

<http://asiasociety.org/files/teachingsummit2013.pdf>

Adi. S.2007. Kompetensi yang hams dimiliki oleh seorang guru. (<http://Saiful.Adi.Wordpress.com>, diakses 2April2008)

<http://www.ml.scrib.com>

www.ets.org

Peraturan dan Regulasi

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Sisdiknas Nomer 20 Tahun 2003.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 4 Juli 2003 nomor 087/O/2003 dan surat nomor 044/O/2004 tanggal 14 Mei 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.127.1/M/PAN/2003 tanggal 30 April 2003 tentang persetujuan pendirian Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49/O/2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja dilingkungan LPMP.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0116/O/1997 tanggal 23 April 1997 tentang Tata Kerja Balai Penataran Guru dan Tenaga Teknis Regional.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0181/O/1979 tanggal 20 Agustus 1979 Balai Penataran Guru dan Tenaga Teknis Regional diubah menjadi Balai Penataran Guru.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0203/O/1978 tanggal 23 Juli 1978.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 024/O/1991 tanggal 2 Mei 1991 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Penataran Guru.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 087/O/2003 tanggal 4 Juli 2003 Balai Penataran Guru menjadi LPMP.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07 Tahun 2007 tentang penyesuaian Perubahan Struktur Organisasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.

Undang-Undang Nomer 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Rumusan Pertanyaan Untuk Kepala LPMP

1. Bagaimana sejarah awal ide terbentuknya LPMP?
2. Seperti apa ideology, visi dan misi, yang menjadi landasan LPMP berdiri?
3. Program seperti apa yang dilakukan LPMP dalam menciptakan guru yang berkualitas?
4. Bagaimana tindakan LPMP dalam meningkatkan kompetensi guru?
5. Apa saja peran penting dari LPMP dalam membentuk guru yang lebih profesional?
6. Bagaimana pandangan bapak kepada mutu guru di Jakarta Selatan?
7. Bagaimana LPMP sebagai Lembaga Penanganan Mutu Pendidikan bersikap terhadap kompetensi pendidikan guru?
8. Bagaimana LPMP sebagai Lembaga Penanganan Mutu Pendidikan bersikap terhadap kompetensi kepribadian guru?
9. Bagaimana LPMP sebagai Lembaga Penanganan Mutu Pendidikan bersikap terhadap kompetensi professional guru?
10. Bagaimana LPMP sebagai Lembaga Penanganan Mutu Pendidikan bersikap terhadap kompetensi kemasyarakatan guru?
11. Bagaimana anda melakukan sosialisasi dalam meningkatkan kompetensi guru kepada widyaiswara LPMP lainnya

Rumusan Pertanyaan untuk Koor Pengawasan LPMP

1. Sejak kapan anda menjadi koor pengawasan LPMP?
2. Apa motivasi anda masuk koor pengawasan LPMP?
3. Keuntungan apa saja yang anda dapatkan selama menjadi koor pengawasan LPMP?
4. Apa saja peran penting dari LPMP dalam membentuk guru yang lebih profesional?
5. Bagaimana pandangan anda kepada mutu guru di Jakarta ?
6. Sebagai koor pengawasan LPMP bagaimana bersikap terhadap kompetensi pendidikan guru?
7. Sebagai koor pengawasan LPMP bagaimana bersikap terhadap kompetensi kepribadian guru?
8. Sebagai koor pengawasan LPMP bagaimana bersikap terhadap kompetensi professional guru?
9. Sebagai koor pengawasan LPMP bagaimana bersikap terhadap kompetensi kemasyarakatan guru?

Rumusan Pertanyaan untuk Widyaiswara

1. Sejak kapan anda menjadi widyaiswara?
2. Apa motivasi anda menjadi seorang widyaiswara?
3. Bagaimana pandangan Anda mengenai mutu pendidikan di Jakarta Selatan?
4. Bagaimana pendapat Anda tentang peran LPMP dalam meningkatkan kompetensi guru?
5. Bagaimana pandangan Anda dalam melihat rendahnya mutu pendidikan dan kompetensi guru di Jakarta?
6. Seberapa penting menurut pandangan Anda tentang program LPMP dalam meningkatkan kompetensi guru?
7. Bagaimana pandangan bapak tentang kurangnya kualitas dan professional guru?
8. Bagaimana LPMP sebagai Lembaga Penanganan Mutu Pendidikan bersikap terhadap kompetensi pendidikan guru?
9. Bagaimana LPMP sebagai Lembaga Penanganan Mutu Pendidikan bersikap terhadap kompetensi kepribadian guru?
10. Bagaimana LPMP sebagai Lembaga Penanganan Mutu Pendidikan bersikap terhadap kompetensi professional guru?
11. Bagaimana LPMP sebagai Lembaga Penanganan Mutu Pendidikan bersikap terhadap kompetensi kemasyarakatan guru?

12. Bagaimana anda melakukan sosialisasi, pengawasan dan evaluasi dalam meningkatkan kompetensi guru?

Rumusan Pertanyaan untuk Ketua MGMP

1. Sejak kapan Ibu menjabat sebagai Ketua MGMP?
2. Bagaimana pandangan Ibu mengenai mutu pendidikan di Jakarta?
3. Bagaimana pendapat Ibu tentang peran LPMP dalam meningkatkan kompetensi guru?
4. Bagaimana pandangan Ibu dalam melihat rendahnya mutu pendidikan dan kompetensi guru di Jakarta?
5. Bagaimana pandangan Ibu tentang kurangnya kualitas dan profesional guru?
6. Bagaimana LPMP sebagai Lembaga Penanganan Mutu Pendidikan bersikap terhadap kompetensi pendidikan guru?
7. Bagaimana menurut Ibu mengenai LPMP sebagai Lembaga Penanganan Mutu Pendidikan bersikap terhadap kompetensi kepribadian guru?
8. Bagaimana menurut Ibu mengenai LPMP sebagai Lembaga Penanganan Mutu Pendidikan bersikap terhadap kompetensi profesional guru?
9. Bagaimana menurut Ibu mengenai LPMP sebagai Lembaga Penanganan Mutu Pendidikan bersikap terhadap kompetensi kemasyarakatan guru?
10. Bagaimana Ibu melakukan sosialisasi, pengawasan dan evaluasi dalam meningkatkan kompetensi guru?

Rumusan Pertanyaan untuk Guru

1. Bagaimana pandangan anda mengenai program yang di berikan LPMP ?
2. Apakah program yang diberikan LPMP telah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh guru ?
3. Apa saja kendala yang didapat ketika mendapatkan program dari LPMP ?
4. Bagaimana pandangan anda mengenai mutu guru yang ada sekarang ?
5. Apakah menurut anda LPMP bisa membantu dalam hal meningkatkan kompetensi guru ?

BIOGRAFI PENULIS



GALIH SEPTIADY KUSWANDI, lahir di Bekasi, 29 September 1994. Semenjak kecil sejak usia 6 tahun sudah memulai pendidikannya di TK Kurnia, Perumahan Margahayu yang tak jauh dari rumahnya. Dalam pendidikan di TK tersebut menempuh masa studinya selama sekitar 1 tahun. Setelah itu, melanjutkan pendidikannya di SDN Margahayu XIII (2000 – 2006). Setelah kelulusan dari SD lalu melanjutkan jenjang yang lebih tinggi yaitu di SMP N 02 Bekasi (2006 – 2009). Selama menempuh pendidikan di sekolah tersebut pada tahun 2009 lulus dan melanjutkan ke SMA N 02 Bekasi (2009 – 2012).

Tahun 2012 melanjutkan kuliah Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Jakarta. Penulis selama kegiatan perkuliahan pernah melakukan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Desa Waymuli, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan pada Bulan Juni 2015. Penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Ciasem Girang Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang (30 Juli – 29 Agustus 2015). Penulis melakukan Praktek Kuliah Mengajar di SMA N 109 Jakarta (7 September – 6 November 2015). Penulis bisa dihubungi melalui jejaring sosial seperti *facebook* Galih Septiady atau email: galihseptiady@yahoo.co.id